

SKRIPSI

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN INDEKS RASIO GINI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH



Disusun Oleh:

**MUTIA SARI
NIM. 150604167**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mutia Sari
NIM : 150604167
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi atau pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Desember 2019

Yang Menyatakan,



Mutia Sari

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi

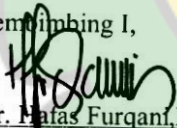
Dengan Judul:

**Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Rasio Gini
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh**
Disusun Oleh:

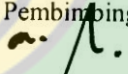
Mutia Sari
NIM. 150604167

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry

Pembimbing I,


Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II,


A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIDN. 2025027902


A R - Mengetahui Ketua
Program Studi Ilmu Ekonomi

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG SKRIPSI

Mutia Sari
NIM. 1506040167

Dengan Judul:

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN INDEKS RASIO GINI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH

Telah Disidangkan oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ilmu Ekonomi

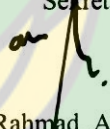
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 11 Desember 2019
14 Rabi'ul Akhir 1441 H
Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

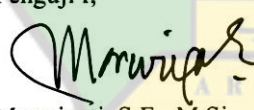
Ketua,


Dr. Hafas Furfani, M.Ec
NIP.198006252009011009

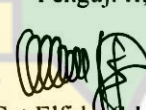
Sekretaris,


A. Rahmad Adi, S.E., M.Si
NIDN.2025027902

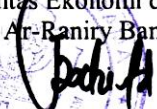
Penguji I,


Marwiyati, S.E., M.Si
NIP. 197404172005012002

Penguji II,


Cut Elfida, S.HI., MA
NIDN.2012128901

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 19640314199203100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Sari
NIM : 150604167
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmui Ekonomi
E-mail : Mutiasariosa@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir 7 ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

**Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Rasio Gini terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

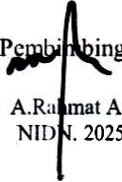
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 11 Desember 2019


Mutia Sari
NIM. 150604167


Pembimbing I
Dr. Hafid Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009)


Pembimbing II
A. Rahmat Adi, S.E., M.Si
NIDN. 2025027902

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam.dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian “**Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Rasio Gini terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh**”

Skripsi ini disusun dengan maksud guna memenuhi persyaratan untuk gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonmi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si. selaku Ketua program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry dan Marwiyati, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan nasehat-nasehat, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua Laboratorium dan Rachmi Meutia, S.E., M.Sc selaku asisten laboratorium prodi Ilmu Ekonomi.

4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I sekaligus dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat dan sangat berguna kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan A. Rahmad Adi, S.E., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing 2 yang dengan kesabaran beliau telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai pedoman skripsi yang ada.
5. Marwiyati, S.E., M.Si dan Cut Elfida, S.HI.,MA selaku dosen penguji I dan dosen penguji II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan-masukan.
6. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan selama kuliah dan seluruh dosen dan staf pengajar FEBI terkhusus jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Kepada pihak BPS Aceh yang telah banyak membantu penulis dalam hal pencarian data penelitian.
8. Terimakasih untuk kedua orangtua tercinta dan tersayang Bapak Sam Sarif Harun dan Ibu Ramayati, dimana telah memberikan motivasi,dukungan moril dan materil serta

semangat dan doa-doa yang telah diberikan sehingga penulis mampu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Terimakasih Pula Penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat Maria Ulfah, Ade Qusrinda, Riska Garnelladan Putri Novillia dimana telah memberikan dukungan besar serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan letting 15 Ilmu Ekonomi yang telah mendukung dan memberi semangat selama perkuliahan berlangsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa penulis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripisi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan yang terkait khususnya.

Banda Aceh, November 2019
Penulis,

Mutia Sari

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	AR - ZANIRY	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
َ ي	<i>Faṭḥahdanya</i>	Ai
َ و	<i>Faṭḥahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHuruf	Nama	Hurufdantanda
اَ / ْ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatauya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> danya	Ī
اُ / ُ	<i>Dammah</i> danwau	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. *TaMarbutoh* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. *Ta marbutoh* (ة) hidup

Ta marbutoh (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutoh* (ة) mati

Ta marbutoh (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutoh* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Mutia Sari
NIM : 150604167
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Rasio Gini terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh
Tanggal Sidang : 11 Desember 2019
Tebal Skripsi : 126 halaman
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Sc
Pembimbing II : A.Rahmat Adi,S.E.,M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Rasio gini terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ekplanasi dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif sendiri bertujuan untuk menjelaskan memberi ringkasan berbagai kondisi berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat untuk menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variable X1 (indeks pembangunan manusia) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan begitu juga dengan variable X2 (indeks rasio gini) mempunyai pengaruh yang signifikan pula terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Indeks pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Rasio Gini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG SKRIPSI.....	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Sistematika Pembahasan.....	12
 BAB II LANDASAN TEORITIS	 14
2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	14
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	16
2.1.2 Faktor yang dapat mempengaruhi PertumbuhanEkonomi	19
2.1.3 PDRB terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	22
2.2 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	24
2.2.1 Teori Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	26
2.2.2 PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	31

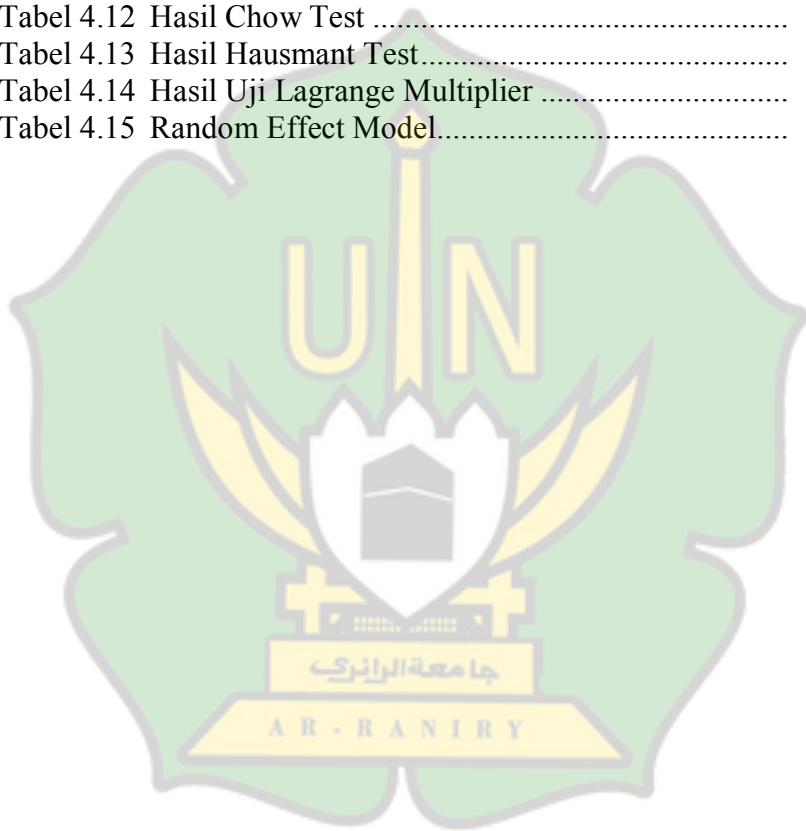
2.3 Pengertian Indeks Rasio Gini (Ketimpangan Pendapatan).....	32
2.3.1 Teori Terkait Indeks Rasio Gini (KetimpanganPendapatan)	34
2.3.2 Faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpanganpendapatan	38
2.3.3 Dampak dari ketimpangan.....	39
2.3.4 PDRB terhadap Indeks Rasio Gini (KetimpanganPendapatan)	39
2.3.5 Pertumbuhan Ekonomi terhadap KetimpanganPendapatan	40
2.4 Indikator Pertumbuhan Ekonomi.....	41
2.5 Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	42
2.6 Indikator Ketimpangan Pendapatan.....	42
2.7 Penelitian Sebelumnya.....	43
2.8 Kerangka Pemikiran	46
2.9 Hipotesis	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian.....	49
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.5 Populasi dan Sampel.....	50
3.5.1 Tekhnik Sampling	51
3.6 Variabel Penelitian.....	52
3.6.1 Pengertian Variable Penelitian	52
3.7 Definisi Operasional	53
3.8 Metode Analisis Data.....	55
3.8.1 Analisis Regresi Data Panel	55
3.8.2 Model Estimasi Regresi Data Panel	56
3.8.3 Uji <i>Goodness of Fit</i>	57
3.9 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)	59
3.10 Uji signifikansi Simultan (Uji f)	59
3.11 Koefisien Determinasi (R^2).....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Gambaran Umum Populasi Penelitian	61
4.1.1 Kota Banda Aceh	63
4.1.2 Kota Sabang	64
4.1.3 Kota Langsa.....	65
4.1.4 Kota Lhokseumawe	67
4.1.5 Kota Subulussalam	68
4.1.6 Kabupaten Bener Meriah.....	69
4.1.7 Kabupaten Gayo Lues	71
4.1.8 Kabupaten Nagan Raya	72
4.1.9 Kabupaten Pidie Jaya	73
4.1.10 Kabupaten Aceh Jaya	74
4.2 Estimasi Regresi Data Panel	76
4.2.1 Hasil <i>Chow Test</i>	76
4.2.2 Hasil <i>Hausman Test</i>	78
4.2.3 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	80
4.3 Hasil Uji <i>Goodness of Fit</i>	81
4.3.1 Hasil Uji Signifikasi Parameter Individu (Uji t) .	84
4.3.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji f)	84
4.4 Hasil Koefisien Determinasi (R_2)	85
4.5 Pembahasan	85
4.5.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan ekonomi.	85
4.5.2 Pengaruh Indeks Rasio Gini terhadap Pertumbuhan Ekonomi	86
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Aceh Tahun 2013-2017 (juta Rupiah).....	3
Tabel 1.2	Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh dalam hitungan Persen (%) periode 2013-2017.....	6
Tabel 1.3	Data Indeks Rasio Gini Provinsi Aceh dalam hitungan Persen (%) periode 2013-2017	7
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya.....	4
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	55
Tabel 4.1	10 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	62
Tabel 4.2	PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Rasio Gini Kota Banda Aceh periode 2010-2017	63
Tabel 4.3	PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Rasio Gini Kota Sabang Periode 2010-2017	64
Tabel 4.4	PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Rasio Gini Kota Langsa Periode 2010-2017	66
Tabel 4.5	PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Rasio Gini Kota Lhokseumawe Periode 2010-2017	67
Tabel 4.6	PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Rasio Gini Kota Subulussalam Periode 2010-2017	69
Tabel 4.7	PDRB, Indeks Pembangunan Manusia Indeks Rasio Gini Kabupaten Bener Meriah Periode 2010-2017	70
Tabel 4.8	PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Rasio Gini Kabupaten Gayo Lues Periode 2010-2017	71
Tabel 4.9	PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Rasio Gini Kabupaten Nagan Raya Periode 2010-2017	72

Tabel 4.10 PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Rasio Gini Kabupaten Pidie Jaya Periode 2010-2017	74
Tabel 4.11 PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Rasio Gini Kabupaten Aceh Jaya Periode 2010- 2017	75
Tabel 4.12 Hasil Chow Test	77
Tabel 4.13 Hasil Hausmant Test.....	79
Tabel 4.14 Hasil Uji Lagrange Multiplier	80
Tabel 4.15 Random Effect Model.....	81



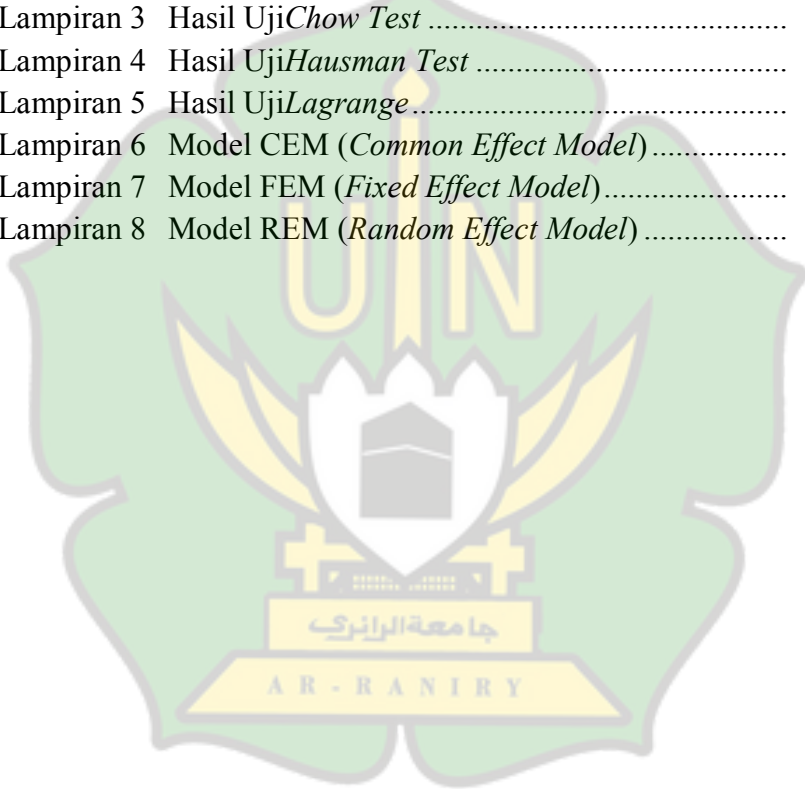
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	46
Gambar 4.1 Peta Provinsi Aceh.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1	Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks RasioGini, dan PDRB Provisi Aceh untuk 10 Kabupaten dalam periode 8tahun (2010-2017 dalam hitungan persen (%))	92
Lampiran 2	Data PDRB 10 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh..	96
Lampiran 3	Hasil Uji <i>Chow Test</i>	99
Lampiran 4	Hasil Uji <i>Hausman Test</i>	100
Lampiran 5	Hasil Uji <i>Lagrange</i>	102
Lampiran 6	Model CEM (<i>Common Effect Model</i>)	103
Lampiran 7	Model FEM (<i>Fixed Effect Model</i>)	104
Lampiran 8	Model REM (<i>Random Effect Model</i>)	105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri oleh banyak pulau-pulau dimana setiap daerah tersebut memiliki keistimewaannya tersendiri. Terlebih mengenai cara mengatur perekonomian pada wilayahnya oleh pemerintah yang tengah menjalankan amanah masyarakat untuk melakukan tugasnya dengan cara sebaik-baik mungkin untuk membangun negeri ini dimana diketahui Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 266,91 juta jiwa tercatat pada tahun 2018.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di tingkat daerah memberikan pelayanan yang lebih efisien, cepat dan efektif (Manan, 2014).

Mengenai hak otonomi khusus salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkannya adalah Provinsi Aceh yang beribukota Banda Aceh, dimana Aceh adalah suatu provinsi yang terletak di ujung negara Indonesia sebagai pulau yang menjadi titik

Km 0 Indonesia. Dimana Aceh terdiri dari 23 Kabupaten/Kota serta berjumlah penduduk yang mencapai 5,19 juta jiwa tercatat pada tahun 2018.

Dalam hal pertumbuhan ekonomi di Aceh dapat diproksikan ke dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dimana PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode biasanya satu tahun (Sumual, 2017). Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut BPS pada hakikatnya pertumbuhan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas lapangan kerja serta pemerataan pembagian pendapatan masyarakat dan mengusahakan pergeseran proses kegiatan ekonomi dari sektor sekunder menjadi sektor primer dan tertier. Hal ini dimaksudkan untuk mengusahakan peningkatan pendapatan masyarakat secara mantap dan diikuti oleh tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Dan menurut Kairupan (2013) PDRB adalah salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi yang biasanya juga digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan menjadi tolak ukur dalam menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang.

Berikut adalah tabel pertumbuhan ekonomi Aceh yang diukur dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada periode tahun 2013-2017:

Tabel 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Aceh
Tahun 2013-2017 (juta Rupiah)

No	Tahun	Jumlah PDRB (ADHK) (Juta Rupiah)
1	2013	111.760.000
2	2014	113.490.000
3	2015	112.670.000
4	2016	116.380.000
5	2017	121.260.000

Sumber data: BPS Aceh

Dari tabel diatas dapat dilihat proksi pertumbuhan ekonomi Aceh melalui PDRB (ADHK) mengalami peningkatan sebesar 1,55% dari tahun 2013 – 2014, akan tetapi pada tahun 2014 - 2015 PDRB Aceh mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar -0,72%. Kemudian pada tahun selanjutnya PDRB Aceh mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2015 – 2016 sebesar 3,3% dan tahun 2016 – 2017 sebesar 4.19% persen.

Sementara dalam hal pertumbuhan ekonomi yang diproksikan ke dalam PDRB tentu IPM atau Indeks Pembangunan Manusia juga menjadi salah satu bagian dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Dimana Indeks pertumbuhan manusia (IPM) merupakan indeks yang ditetapkan oleh UNDP pada tahun 1996 untuk

mengukur kesejahteraan masyarakat. Dan alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah, pertama banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan (Bhakti, 2014).

Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) IPM merupakan suatu hal yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan pendidikan, dan lain sebagainya. IPM juga dikenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM juga dibentuk berdasarkan 3 dimensi dasar yang berupa:

1. Umur panjang
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjelaskan bahwa IPM mempunyai beberapa manfaat sebagai salah satu bagian dari perekonomian yaitu merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, dapat menentukan peringkat serta level pembangunan suatu wilayah atau negara dan bagi Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga

digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Keterkaitan antara IPM dengan pembangunan juga telah menjadi tolak ukur dimana pembangunan merupakan transformasi atau perubahan dari suatu kondisi tertentu menuju suatu kondisi yang lebih baik. Dalam konteks kesejahteraan social pembangunan berarti upaya memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka setiap perubahan yang menuju pada suatu keadaan yang lebih baik dapat dimaknai sebagai bentuk dari pembangunan (Soleh, 2014).

Kusumuadma dalam Manan (2014) menyebutkan bahwa hakikat dari pembangunan nasional terletak pada masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup. Hal ini dikaitkan bahwa perlunya perubahan sikap mental seluruh rakyat Indonesia untuk menginspirasi pembangunan nasional karena pembangunan nasional selalu mengandung hal-hal baru.

Maka kutipan dalam Manan (2014) diatas dapat dilihat adanya keterkaitan antara pembangunan manusia dengan pembangunan nasional. Dimana kedua hal tersebut merupakan bagian dari perekonomian di suatu wilayah ataupun negara. Berikut merupakan tabel data IPM di Provinsi Aceh periode 2014-2017 yang sumber datanya diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh
dalam hitungan Persen (%) periode 2013-2017

No	Tahun	Data IPM(%)
1	2013	68.3
2	2014	68.81
3	2015	69.45
4	2016	70
5	2017	70.6

Sumber data: BPS Aceh

Berdasarkan tabel 1.1. diatas yang merupakan data IPM Provinsi Aceh periode 2014-2017 maka pada tahun 2013 jumlah data IPM Provinsi Aceh sebesar 68.3% dan pada 2014 jumlah data IPM sebesar 68.81 % dan naik sebesar 69.45% pada tahun 2015 dan terus menerus naik mencapai angka 70% dan 70.6% ditahun 2017. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam periode 2014-2017 untuk data IPM Provinsi Aceh mengalami peningkatan pada tiap-tiap tahunnya.

Sementara dalam penelitian ini Indeks Rasio Gini sebagai ketimpangan pendapatan juga merupakan bagian dari ekonomi, dimana Indeks Rasio Gini digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Menurut BPS selain digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh koefisien gini bernilai 0 sampai 1.

Apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Dan berikut tabel Indeks Rasio Gini di Provinsi Aceh

periode 2014-2017 yang sumbernya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh :

Tabel 1.3
Data Indeks Rasio Gini Provinsi Aceh
dalam hitungan Persen (%) periode 2013-2017

NO	Tahun	Rasio Gini (%)
1	2013	0.31
2	2014	0.32
3	2015	0.33
4	2016	0.33
5	2017	0.33

Sumber data: BPS Aceh

Dari tabel 1.2 diatas yang merupakan data indeks rasio gini Provinsi Aceh dapat dilihat bahwa ketimpangan pendapatan pada tahun 2013 mencapai 0.31% dan pada tahun 2014 mencapai 0.32% dan naik sebanyak 0.33% pada tahun 2015 sampai dengan 2017, dimana BPS mengatakan jika tingkat ketimpangan <0.3 berarti tingkat ketimpangan pendapatan rendah, distribusi pendapatan semakin merata. Jika 0.3-0.5 tingkat pendapatan sedang jika >0.5 tingkat ketimpangan pendapatan tinggi.

Untuk mendukung penelitian ini,terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pembangunan ekonomi maupun kesenjangan ekonomi. Penelitian dilakukan oleh:

Sumual (2016) dalam penelitiannya mengatakan Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi.Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator

pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah.

Sementara (Suhartono, 2015) Ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan penambahan kesempatan kerja (fungsi distribusi pendapatan dan produksi) akan meningkatkan ketimpangan dalam penambahan pendapatan dan selanjutnya penduduk yang tidak terserap atau menganggur dalam proses produksi menjadi penduduk miskin atau secara agregat daerah menjadi tertinggal. Pertumbuhan yang tidak merata di suatu daerah, dapat dipengaruhi oleh pemusatan atau gravitasi kegiatan ekonomi dan pertumbuhan pada salah satu daerah, sehingga daerah lainnya tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh secara bersamaan.

Sedangkan menurut (Asih, 2015) Sebagai upaya dalam mengatasi ketimpangan pendapatan, pada tahun 2001 pemerintah Indonesia memberlakukan sebuah kebijakan yaitu kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan alasan bahwa kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat tidak semuanya bisa diterapkan diseluruh daerah, daerah yang memiliki daya dukung sesuai dengan kriteria kebijakan nasional akan dengan mudah menyerap peluang pembangunan, sedangkan

yang tidak sesuai kriteria kebijakan nasional akan mengalami perlambatan dalam pembangunan.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata (Yuliani, 2015).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya, hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya (Siradjuddin, 2015).

Terkait judul diatas dan penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan IPM dan Indeks Rasio Gini serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh?
3. Apakah Indeks Rasio Gini (Ketimpangan pendapatan) mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh?

4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Rasio Gini mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana Indeks Rasio Gini (ketimpangan pendapatan) mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Rasio Gini mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini tentu memiliki manfaat yang berupa penambahan wawasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia serta hubungannya dengan ketimpangan pendapatan, dimana ketimpangan merupakan jurang antara kaya dan miskin. Maka penelitian ini bermanfaat untuk mencari solusi dari masalah pembangunan yang menyebabkan ketimpangan dan mengetahui apa yang menyebabkan ketimpangan itu sendiri terjadi. Adapun pembagian manfaatnya yang dapat diperoleh oleh beberapa pihak diantaranya adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis serta pemikiran dalam upaya meningkatkan pertumbuhan Provinsi Aceh dan upaya penanganan ketimpangan akibat dari suatu pembangunan

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu:

a. Bagi penulis

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan serta indeks pembangunan manusia. Penelitian ini juga bermanfaat untuk penulis dalam memasuki dunia kerja nantinya dikarenakan sudah mengetahui sedikit lebih dan kurang hal-hal yang menyangkut ekonomi sebagai Sarjana Ekonomi nantinya.

b. Bagi Universitas

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil oleh universitas yaitu dapat dijadikan referensi terutama untuk para peneliti lainnya yang akan meneliti tentang pembangunan maupun ketimpangan lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan perbandingan serta penelitian lebih lanjut nantinya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul Pembangunan dan kesenjangan ekonomi di Kota Banda Aceh, maka terdapat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab I hingga bab V. Dan berikut uraian dari sistematika pembahasan oleh ke lima bab tersebut yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas penelitian yang dimulai dari latar belakang yang menjelaskan peta masalah yang akan diteliti, dan kemudian terdapat rumusan masalah yang merupakan problem atau masalah yang akan dibuat, dan kemudian terdapatnya tujuan penelitian yang menjelaskan tentang suatu hal yang akan di capai dalam melakukan penelitian, serta terdapat manfaat penelitian yang menjelaskan tentang manfaat penelitian yang akan di peroleh dari penelitian tersebut. Serta terdapat sistematika pembahasan yang menjelaskan bagian-bagian penulisan skripsi pada setiap babnya.

BAB II LANDASAN TEORI

Kemudian pada bab II terdapat teori yang relevan pada topik yang akan dibahas, kemudian terdapatnya temuan penelitian terkait serta model penelitian atau kerangka berfikir. Dan bagian terakhir pada bab II terdapatnya pengembangan hipotesis yang berupaya untuk merumuskan hipotesis dengan argument yang dibangun dari teori atau logika dan penelitian sebelumnya yang relevan.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab III secara umum penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian seperti penjelasan tentang jenis penelitian yang akan dilakukan. Data dan teknik memperolehnya, Teknik pengumpulan data, skala pengukuran dan beberapa bagian lainnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemudian pada bab IV, memuat deskripsi obyek penelitian hasil serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya.

BAB V PENUTUP

Dan pada bab V merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dipandang oleh para ekonom sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ada tiga komponen dasar yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa yaitu: (1) meningkatnya secara terus menerus persediaan barang, (2) teknologi maju sebagai faktor utama yang menentukan derajat pertumbuhan dalam menyediakan aneka ragam barang kepada penduduknya, (3) penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideology sehingga inovasi yang dihasilkan oleh IPTEK umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Hasyim, 2016).

Para ekonom sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan output barang atau material dan jasa dalam suatu jangka waktu tertentu. Atau dengan kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Hasyim, 2016).

Sementara Sukirno (2010) mengatakan bahwa istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal.

Budiono seorang ahli ekonomi asal Indonesia mengatakan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan (output perkapita untuk naik) yang bersumber dari proses intern perekonomian tersebut, bukan berasal dari luar dan bersifat sementara atau mumentu bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat (Pambudi, 2013).

Dan menurut Sumual (2016) pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah tolak ukur perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan juga merupakan proses

kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa *rill* terhadap penggunaan faktor–faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya.

Adapun menurut Khoirunnisa dalam Siradjuddin (2015), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran tingkat kemakmuran yang menjadi perhatian masyarakat di negara maju maupun negara berkembang, berbagai negara selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonominya.

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Model pertumbuhan ekonomi yang umum digunakan sebagai acuan adalah *exogeneous growth* model atau *solow growth* model. Model solow mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh perubahan faktor produksi modal fisik (tabungan dan investasi) dan tenaga kerja (pertumbuhan populasi) sementara teknologi yang menggambarkan tingkat efesiensi merupakan *variable* eksogen dan dianggap sebagai residual. Model solow merupakan perkembangan dari model pertumbuhan Harrod-Domar dengan menambahkan faktor tenaga kerja dan teknologi kedalam persamaan pertumbuhan. Tenaga kerja dan modal diasumsikan mengalami *diminishing* *turns* jika keduanya

dianalisis secara terpisah dan constants returns to scale apabila keduanya dianalisis secara bersama-sama (Maryaningsih, 2014).

Adapun model pertumbuhan Solow memakai beberapa fungsi produksi agregat diantaranya yaitu:

$$Y = A K^{\alpha} L^{1-\alpha} \quad (1)$$

dengan:

Y : Produk domestik bruto (PDB)

K : Stok modal fisik dan modal manusia

L : Tenaga kerja

A : Tingkat kemajuan teknologi

α : Elastisitas output terhadap modal

Persamaan (1) di atas apabila dinyatakan dalam per tenaga kerja maka:

$$\frac{Y}{L} = A \left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha} = A k^{\alpha} \quad (2)$$

Keterangan :

k : pendapatan per tenaga kerja

y : akumulasi kapital per tenaga kerja

Dengan demikian, model pertumbuhan Solow menekankan pentingnya peranan investasi dalam proses akumulasi modal fisik (*physical capital*). Laju pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh tingkat akumulasi kapital per tenaga kerja. Berdasarkan model ini, daerah yang memiliki akumulasi kapital lebih baik akan tumbuh lebih tinggi.

Strategi pembangunan menurut pandangan Klasik mengandalkan peran sisi penawaran dalam mencapai tingkat kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Bagaimanapun kemandegan ekonomi sejak masa depresi besar telah memposisikan pemerintah sebagai pemain penting melalui kemampuannya menciptakan permintaan dalam ekonomi (pandangan Keynesian). Pandangan Keynesian mengenai perekonomian yang disetir oleh permintaan agregat telah memberikan justifikasi campur tangan pemerintah dalam menciptakan permintaan dalam perekonomian. Pemerintah melalui efek pengganda dapat meningkatkan kegiatan produktif dalam perekonomian melalui pengaturan pengeluaran pemerintah. Pembangunan ekonomi menurut pandangan Keynesian ditentukan oleh kegiatan rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri dalam membentuk permintaan agregat (*aggregate demand*). Keberhasilan pembangunan tersebut bagaimanapun perlu diukur dengan menggunakan indikator baik sosial maupun ekonomi yang dapat diterima secara umum serta mampu mendeskripsikan kondisi riil di lapangan. Indikator yang umum digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi adalah angka-angka PDRB, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan kondisi sosial kemasyarakatan di bidang pendidikan dan kesehatan (Bariyah, 2015).

2.1.2 Faktor yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2010) mengatakan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum adalah sebagai berikut:

a. Tanah dan kekayaan Alam

Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Didalam setiap negara dimana pertumbuhan ekonomi diluar sektor utama (pertanian dan pertambangan) yaitu sektor dimana kekayaan alam terdapat.

b. Jumlah dan Mutu tenaga kerja dan penduduk

Mutu tenaga kerja dan masyarakat suatu negara merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara karena ilmu pengetahuan yang dimiliki tenaga kerja akan mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi.

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi.

Disamping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi.

c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang modal dapat mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi dikarenakan jumlah modal akan menentukan jumlah produk yang akan dihasilkan. Efek yang utama adalah:

1. Kemajuan teknologi dapat mempertinggi keefisienan kegiatan memproduksi sesuatu barang. Kemajuan seperti itu akan menurunkan biaya produksi dan meninggikan jumlah produksi.
2. Kemajuan teknologi menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah di produksi sebelumnya. Kemajuan seperti itu menambah barang dan jasa yang dapat digunakan masyarakat.
3. Kemajuan teknologi dapat meninggikan mutu barang-barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harganya.
- d. Sistem sosial dan sikap masyarakat.

Beberapa kebiasaan atau adat istiadat yang secara tradisional dianut oleh masyarakatnya menolak untuk menggunakan peralatan yang tidak produktif atau tidak efisien.

Sementara menurut (Pambudi, 2013) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah aglomerasi, investasi angkatan kerja yang bekerjadan *human capital investmen*. Dimana:

- a. Aglomerasi atau pola pemusatan yang artinya terjadi pemusatan berbagai industri ke dalam suatu tempat tertentu sehingga

memunculkan pertumbuhan ekonomi baru pada tempat tersebut.

- b. Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan dalam rangka untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada supaya menambah jumlah produksi.
- c. Angkatan kerja yang bekerja adalah penduduk yang berusia 16 tahun atau lebih yang sudah bekerja atau sedang mencari kerja atau kegiatan lain.
- d. *Human capital investmen* merupakan pengaruh pendidikan formal terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, maksudnya adalah semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh seseorang maka akan meningkatkan produktifitas kerja orang tersebut juga.

Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Julian dalam Bhakti (2018) yaitu :

- a. Sumber daya alam
- b. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Jumlah dan mutu pendidikan penduduk
- d. System sosial
- e. Pasar

2.1.3 PDRB terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam periode tertentu. Penyusunan PDRB dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan. Maka dalam hal PDRB dan pertumbuhan ekonomi untuk melihat pertumbuhan ekonomi terhadap PDRB dilakukan pada dua pendekatan yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran.

Menurut Dewi & Budhi (2018) pertumbuhan ekonomi diukur melalui PDRB berdasarkan harga konstan, supaya angka pertumbuhan yang dihasilkan ada pertambahan produksi. Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) PDRB merupakan neraca makro ekonomi yang dihitung secara konsisten dan terintegrasi berdasarkan konsep, definisi, klasifikasi dan cara penghitungan yang telah disepakati secara Internasional. Tujuan menghitung PDRB adalah untuk mengetahui total produksi barang dan jasa pada suatu wilayah selama kurun waktu tertentu.

Nilai PDRB adalah nilai tambah dari total produksi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan produksi adalah aktifitas ekonomi yang menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Perubahan nilai PDRB dari waktu ke waktu terjadi karena dua hal, yaitu terjadinya perubahan

harga barang dan jasa atau karena terjadinya perubahan volume. Karenanya ada dua jenis nilai PDRB disajikan yakni berdasarkan harga konstan dan berdasarkan harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi (Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2017)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, salah satunya adalah pendekatan pendapatan yang menjelaskan bahwa PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah tertentu. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan neto.

Untuk sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha (bunga neto, sewa tanah dan keuntungan) tidak diperhitungkan. Pendekatan pengeluaran yang dilihat dari belanja langsung digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat untuk keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah, yayasan sosial, pembentukan modal dan ekspor (Widyaningsih, 2018).

Secara umum perkembangan PDRB dapat diartikan sebagai perkembangan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat yang meningkat. Proses kenaikan output per kapita di produksi dengan Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB) yang didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah (Rarung, 2016).

2.2 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya (Bhakti, 2013).

Sementara Wardana (2016) mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu pengukuran dalam perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan serta standar hidup yang layak bagi semua negara. Pembangunan manusia menjadi penting karena apabila suatu daerah tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial maka dapat menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun dan memajukan daerahnya. Jadi, sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pembangunan suatu daerah. Indeks pembangunan manusia (IPM) bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antar daerah.

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS) IPM merupakan suatu hal yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM juga dikenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM juga dibentuk berdasarkan 3 dimensi dasar yang berupa:

1. Umur panjang
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Salah satu indikator penting yang dianggap lebih holistic dari sekedar pertumbuhan ekonomi adalah *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia). HDI merupakan indeks gabungan dari tiga indikator: *longevity* sebagai ukuran harapan hidup, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kombinasi melek huruf penduduk dewasa (bobot $\frac{3}{4}$) dan gabungan dari rasio pendidikan tinggi primer, sekunder, tersier bruto (bobot $\frac{1}{3}$) dan standar hidup layak (*decent standard of living*) yang diukur oleh PDB riil per kapita dalam paritas daya beli (Bariyah, 2015).

Hasil dari berbagai penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan perkapita dan akhirnya mengarah pada penurunan angka kemiskinan. Indonesia telah berupaya memerangi kemiskinan sejak kemerdekaan dengan hasil bervariasi dan hal tersebut merupakan suatu tantangan bagi pembangunan (Boediono, 2016).

2.2.1 Teori Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Adapun Empat hal pokok yang perlu di perhatikan dalam pembangunan manusia menurut UNDP dalam Hakim (2013) adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan. Titik berat pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep tersebut, yakni konsep pembangunan manusia seutuhnya yang menghendaki

peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual. IPM dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = (\text{index } X_1 + \text{index } X_2 + \text{Index } X_3) / 3 \quad (3)$$

Dengan Keterangan sebagai :

X_1 = Lama hidup

X_2 = Tingkat Pendidikan

X_3 = Tingkat kehidupan yang layak

Hakim (2013) juga mengatakan dalam penelitiannya bahwa Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB berkaitan erat dengan IPM. Bahkan boleh dikatakan bahwa IPM merupakan pengukur kesejahteraan yang disempurnakan, sementara PDB adalah pengukur kesejahteraan yang lama. Namun demikian, dua pengukur tersebut tidak harus selalu berjalan linier, karena peningkatan PDB tanpa disertai peningkatan pemerataan pendapatan dan alokasi atas aktivitas yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tidak akan meningkatkan IPM. Dalam memodelkan pengaruh desentralisasi terhadap IPM, variabel PDB bisa dianggap sebagai sebuah variabel kontrol.

Adapun Wardana (2016) menyebutkan dalam penelitiannya Pembangunan manusia menekankan terpenuhinya kehidupan yang layak bagi manusia. Pertumbuhan ekonomi dapat menunjang pemenuhan hak dan kebebasan, serta mempromosikan simbiosis antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, antara ekonomi yang maju dan politik yang sehat serta antara kesejahteraan

masyarakat dan individu. Pembangunan yang menjamin keberlanjutan hidup manusia dan berkeadilan sosial, merupakan kewajiban negara untuk memenuhi kewajibannya terhadap hak atas pembangunan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, program pembangunan harus diarahkan untuk pemerataan dan pengurangan pemiskinan melalui komitmen visi pembangunan nasional, dan diimplementasikan melalui konsep pembangunan yang berpihak kepada orang miskin (*pro-poor development*).

Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjelaskan bahwa IPM mempunyai beberapa manfaat sebagai salah satu bagian dari perekonomian yaitu merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, dapat menentukan peringkat serta level pembangunan suatu wilayah atau negara dan bagi Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Maka dari itu Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa “*social development is economic development*” (Wardana, 2016).

Adapun terkait hal pembangunan manusia yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi

yang baik dan distribusi pendapatan yang merata tanpa adanya disparitas. Selain untuk mensejahterakan masyarakat, pembangunan manusia juga bertujuan untuk mengejar ketertinggalan serta mensejajarkan setiap daerah kabupaten yang sudah maju. Ada beberapa faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia diantaranya pendidikan, kesehatan serta hidup yang layak (Siradjuddin, 2016).

Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat, manusia bukan hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu Negara. Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, dan paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). Besarnya angka indeks tersebut, secara simultan perlu diteliti beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap naik turunnya IPM (Pratowo, 2011).

Pada umumnya pembangunan manusia dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk melihat perkembangan yang terjadi dalam proses kegiatan ekonomi dan merupakan indikasi untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Perekonomian suatu negara bisa dikatakan berhasil apabila kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya serta perkembangan

kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan penambahan kesempatan kerja (fungsi distribusi pendapatan dan produksi) akan meningkatkan ketimpangan dalam penambahan pendapatan dan selanjutnya penduduk yang tidak terserap atau menganggur dalam proses produksi menjadi penduduk miskin atau secara agregat daerah menjadi tertinggal. Pertumbuhan yang tidak merata di suatu daerah, dapat dipengaruhi oleh pemusatan atau gravitasi kegiatan ekonomi dan pertumbuhan pada salah satu daerah, sehingga daerah lainnya tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh secara bersamaan (Suhartono, 2015).

Seperti halnya pembangunan manusia di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Dan dalam hal pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi didalam wilayah tersebut (Wardana, 2016).

Soleh (2014) mengatakan bahwa Selain sumber daya alam, sumber daya manusia juga merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Bahkan, faktor ini disebut

kunci dari proses pembangunan itu sendiri. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, proses pengorganisasian dalam tujuan mencapai tingkat pembangunan ekonomi dapat terwujud. Negara yang miskin sumber daya alam tapi memiliki sumber daya manusia yang baik bisa menjadi negara maju dibandingkan negara yang kaya sumber daya alam tapi memiliki sumber daya manusia yang rendah.

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti kutipan-kutipan para peneliti terdahulu yang berada pada bahasan awal diatas maka dapat kita lihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat lah berpengaruh terhadap pembangunan suatu wilayah atau Negara.

2.2.2 PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) selama ini dipercaya sebagai salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemudian UNDP mengajukan indikator lain yang dianggap lebih baik guna mengukur keberhasilan pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan IPM dan pembangunan ekonomi khususnya pembangunan ekonomi di daerah. Kewenangan otonomi daerah, diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran keuangannya dalam

rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain untuk membiayai pembangunan sektor-sektor ekonomi, pemerintah daerah perlu merealokasi pembiayaan publik sektor pendidikan dan kesehatan (Wardana, 2016).

2.3 Pengertian Indeks Rasio Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Gini Rasio merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat kepincangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah yang telah diakui secara luas. Indeks gini rasio dengan asumsi-asumsi tertentu dapat pula dipergunakan untuk bahan analisis perbandingan pembagian pendapatan relatif antar masyarakat dari beberapa negara atau wilayah tertentu. Dalam membagi pendapatan Bank Dunia mengukur distribusi pendapatan atas tiga kelompok yaitu:

1. Kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah
2. Kelompok 40% penduduk berpendapatan menengah
3. Kelompok 20% penduduk yang berpendapatan tinggi.

Selanjutnya ketidakmerataan sebaran pendapatan yang menyebabkan pembagian pendapatan dalam keadaan kepincangan parah, sedang, ringan yang dapat diukur (Syamsuddin, 2011).

Ketimpangan Pendapatan merupakan Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Ada beberapa macam kesenjangan yang kerap kali mengganjal suatu masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraannya yaitu kesenjangan

antar daerah, kesenjangan antar sektor, dan kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat. Isu kesenjangan dan pertumbuhan hingga kini masih merupakan debat yang tak berkesudahan dalam konteks pembangunan. Seringkali ada *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di negara-negara sedang berkembang dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah (Fadliansyah, 2016).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Rasio Gini atau Ketimpangan Pendapatan adalah merupakan bagian dari ekonomi, dimana Indeks Rasio Gini digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Menurut BPS selain digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh koefisien gini bernilai 0 sampai 1. Apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Chambers dalam Maipita (2014) mengatakan ketimpangan merupakan suatu gejala yang timbul dalam masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan yang lainnya diantara masyarakat yang hidup di suatu wilayah.

Sementara itu ketimpangan ekonomi juga diketahui sangat berkaitan dengan kesenjangan pendapatan, kekayaan, serta jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang mengacu pada persebaran ukuran ekonomi diantara individu dalam

kelompok, kelompok dalam populasi antar negara. Kesenjangan secara umum juga dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan yang menjadi pemisah kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

2.3.1 Teori Terkait Indeks Rasio Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Dalam hal terkait tentang ketimpangan tentunya ada pula keterkaitannya dengan kemiskinan, dimana secara umum diketahui bahwa kesenjangan itu sendiri merupakan jurang antara si kaya dan si miskin. Dimana menurut BPS (Badan Pusat Statistik) kemiskinan itu sendiri masyarakat tergolong dalam kemiskinan apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan kata lain kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya baik makanan maupun non makanan. Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam sebuah pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan akan memberikan dorongan kepada daerah keterbelakang agar terdorong untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Maipita (2014) mengatakan bahwasannya masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat

sasaran. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Pada akhirnya, data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Jadi kemiskinan tidak dapat terhenti di belahan dunia manapun sebelum rantai kemiskinan dapat terputuskan. Dan tugas dari masyarakat dan pemerintah adalah memutuskan rantai kemiskinan tersebut.

Dan bahkan kebutuhan ekonomi, emosional, sosial, dan politik sangat beragam bagi setiap orang. Oleh karena itu pengertian dari kata miskin dipersempit, yaitu hanya dalam hal masalah ekonomi.

Dan pada kemiskinan itu sendiri Chambers dalam (Maipita, 2014) ada 5 keadaan yang kurang menguntungkan dan menjadi rangkaian kemiskinan atau sering disebut dengan lingkaran kemiskinan yaitu *powerlessness, vulnerability, poverty, isolation dan physical weakness*.

Dalam hal politik pun perekonomian berperan dan dapat mempengaruhi secara timbal balik. Ada masa ketika kekuatan politik dominan dan ekonomi subordinasikan di bawahnya. Dan bahwa hakikatnya proses pembangunan adalah hasil interaksi

proses ekonomi dan politik yang saling mempengaruhi secara timbal balik (Boediono, 2016).

Ketimpangan pendapatan seringkali menjadi permasalahan serius dan jika tidak dapat diatasi secara hati-hati akan menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan juga dalam konteks makro dapat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah. Wilayah maju terus meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor non unggulan yang membebani. Di Indonesia sendiri terlihat adanya wilayah yang maju dan yang kurang maju sebagai akibat dari perbedaan tersebut. Maka disinilah peran pemerintah diperlukan dalam penyelesaian pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan wilayah sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pemerataan wilayah akan meningkat pula. Di era otonomi daerah sekarang ini, dimana setiap daerah dituntut untuk mengelola sendiri potensi daerah yang dimilikinya secara tepat sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembangunan dengan tingkat pemerataan yang baik serta pertumbuhan ekonomi yang baik pula (Bantika, 2012).

Adapun masalah kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan merupakan suatu masalah pokok yang selalu dikaitkan dengan pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negaranegara yang sedang

berkembang. Oleh sebab itu penghapusan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi mutlak diperlukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apabila pemerintah tidak secara aktif melakukan campur tangan dalam kegiatan ekonomi, maka kegiatan perekonomian akan diatur oleh mekanisme pasar dan kemudian memberikan dampak negatif bagi pembangunan selanjutnya yaitu melebarnya jurang kesejahteraan dari masa ke masa antara daerah kaya dengan daerah miskin sebagai akibat dari kegiatan ekonomi daerah kaya lebih lancar dibandingkan dengan daerah miskin. Dari pembahasan masalah ketimpangan diatas, dapat diketahui bahwa ketimpangan pendapatan antar daerah atau golongan masyarakat adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari selama masih ada perbedaan kemampuan dan faktor-faktor yang berpengaruh tersebut. Sehingga yang menjadi perhatian disini adalah usaha untuk mengurangi kesenjangan yang terlalu besar melalui pengelolaan faktor-faktor dan sumber daerah secara optimal. Dengan demikian akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik disertai dengan pemerataan pendapatan yang baik pula (Darmajati, 2010).

Sementara Yuliani (2015) mengatakan upaya mewujudkan pemerataan ketimpangan dan pembangunan antar daerah menjadi sangat penting agar tujuan dari pembangunan yakni peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi kebutuhan barang pokok,

peningkatan standar hidup masyarakat dapat terwujud bersama-sama baik pada tingkat regional maupun nasional.

2.3.2 Faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan

Menurut Arsyad dalam Hartini (2017) ada delapan hal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan diantaranya:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tapi tidak diikuti secara proposional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidak merataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang banyak dalam proyek-proyek yang padat modal sehingga presentase pendapatan modal dari harta bertambah besar dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai

akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.

8. Hancurnya insudtri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

2.3.3 Dampak dari ketimpangan

Todarodalam Hartini (2017) juga mengemukakan bahwa adanya dampak terhadap ketimpangan baik positif maupun negative yaitu:

1. Dampak Positif

Dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraan.

2. Dampak Negatif

Terjadinya inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan rakyat.

2.3.4 PDRB terhadap Indeks Rasio Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Ketimpangan pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat

keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut yang menyebabkan besaran PDRB berbeda-beda antar daerah (Sasana, 2010).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, salah satunya adalah pendekatan pendapatan yang menjelaskan bahwa PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji sewa tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusunan neto. Jumlah semua komponen pendapatan persektor disebut juga sebagai nilai tambah bruto seluruh sektor.

2.3.5 Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan

Pendapatan

Simon Kuznets dalam (Todaro, 2008) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk (ketimpangan membesar atau meningkat) namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan

membaik. Maka observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets U-terbalik atau sering disebut hipotesis Kuznets.

2.4 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Indikator dari pertumbuhan ekonomi menurut Hasyim (2016) secara umum antara lain:

1. Pendapatan Nasional Riil perubahan yang terjadi terhadap pendapatan nasional riil dipakai berbagai negara untuk menilai pertumbuhan ekonomi negara dalam jangka panjang. Sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi jika pendapatan nasional riilnya naik atau meningkat dari periode sebelumnya
2. Pendapatan Riil Perkapita, sebuah negara disebut mengalami pertumbuhan jika pendapatan masyarakatnya meningkat dari waktu ke waktu.
3. Kesejahteraan Penduduk, meningkatnya kesejahteraan materiailah terjadi pada masyarakat terus meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Hal itu bisa dilihat dari lancar pendistribusian barang dan jasa pada negara itu. Distribusi barang dan jasa yang lancar menggambarkan distribusi pendapatan per kapita di seluruh wilayah negara tersebut. Yang berarti terdapat peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh di semua wilayah.
4. Tenaga Kerja Dan Pengangguran, sebuah negara disebut negara berkembang jika telah mencapai tingkat pemakaian

tenaga kerja dengan maksimal atau kesempatan kerja penuh jika tingkat pengangguran kurang dari empat persen.

Sementara indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah data produk domestik bruto (Gross Domestic Product-GDP) yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. Sementara GNP (Gross Nasional Product) kurang lazim di pakai karena hanya melihat batas wilayah terbatas pada negara yang bersangkutan.

2.5 Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) IPM dibentuk berdasarkan 3 dimensi/indikator yang berupa:

1. Umur panjang
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

2.6 Indikator Ketimpangan Pendapatan

Menurut (Siradjuddin, 2015) ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni *axiomatic* dan *stochastic dominance*. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu *thegeneralized entropy* (GE), ukuran atkinson, dan koefisien gini. Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila 0 :

kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan) dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan. Ide dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari kurva lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan. Tingkat ketidakmerataan sedang, apabila kelompok tersebut menerima 12% sampai 17% dari jumlah pendapatan. Sedangkan ketidakmerataan rendah, apabila kelompok tersebut menerima lebih besar dari 17% dari jumlah pendapatan.

2.7 Penelitian Sebelumnya

Untuk mendukung penelitian initerdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pembangunan ekonomi maupun kesenjangan ekonomi. Penelitian dilakukan oleh:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Suhartono, (2015)	Metode kuantitatif yang memperoleh	dipengaruhi oleh pemusatan atau	pengaruh ketimpangan dan hubungannya	Penelitian suhartono lebih menjelaskan

Tabel 2.1 (Lanjutan)

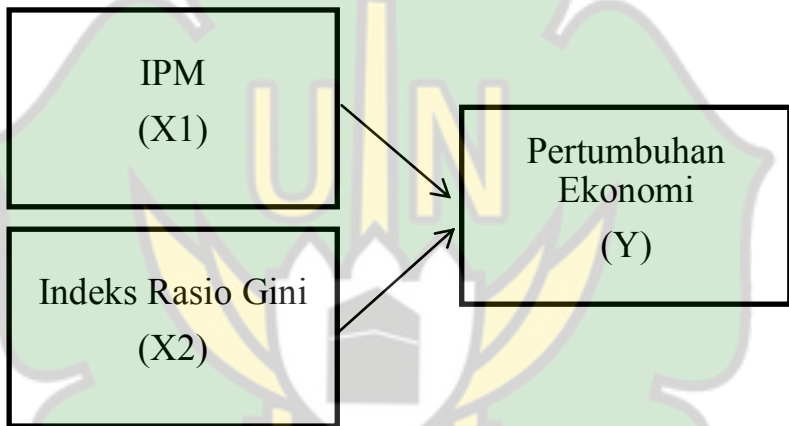
		data skunder dari BPS	gravitasi kegiatan ekonomi dan pertumbuhan pada salah satu daerah, sehingga daerah lainnya tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh secara bersamaan.	dengan pertumbuhan ekonomi	lebih detail mengenai kesempatan kerja dan hubungannya terhadap pertumbuhan ekonomi
2	(Yuliani, 2015)	Metode kuantitatif yang memperoleh data sekunder melalui BPS yang meliputi PDRB per kapita.	Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci untuk mengatasi masalah kemiskinan, menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi, melindungi lingkungan dan memperkuat tatanan sipil.	Pertumbuhan ekonomi dapat mengatasi hal kemiskinan dan mengatasi ketimpangan yang tidak merata.	Lebih menganalisis tentang pertumbuhan ekonomi yang meliputi PDRB serta bagaimana PDRB di pengaruhi oleh IPM dan Indeks Rasio Gini
3	(Kairupan, 2013)	Menggunakan metode Kuantitatif dengan menganalisis data sekunder kuantitatif pada rentang waktu antara	1. PDRB berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja	Sama-sama melakukan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dengan PDRB sebagai alat ukur	Tidak meneliti tentang IPM maupun Indeks Rasio Gini. Kairupan (2014) meneliti.

Tabel 2.1 (Lanjutan)

		tahun 2000 sampai 2012	2. Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja. 3. Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kesempatan Kerja		tentang kesempatan kerja, tingkat inflasi dan belanja daerah.
4	(Darmajati, 2010)	Variable dependen: ketimpangan pendapatan provinsi Jawa Tengah yang diukur dengan menggunakan indeks williamson Variable independen pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar, aglomerasi	Darmajati menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pada provinsi Jawa Tengah, beberapa diantaranya adalah kesehatan dan pendidikan	Menganalisis ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah serta mencoba mencari pengaruhnya terhadap variable lainnya	Hal-hal yang mempengaruhi ketimpangan serta pengaruhnya terhadap suatu variabel.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah seluruh kegiatan penelitian sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dalam satu kesatuan yang utuh. Kerangka pemikiran digunakan untuk memudahkan arah didalam penelitian (Umar, 2008). Maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa penelitian ini akan menganalisis mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Rasio Gini terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Maka penelitian ini akan meneliti apakah Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Rasio Gini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

2.9 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009) hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenaran yang masih harus diuji dengan menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan dalam hal teori, dugaan, pengalaman pribadi/orang lain, kesan umum, kesimpulannya adalah masih sangat awal. Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diverifikasi menggunakan data / informasi yang dikumpulkan melalui sampel.

Sementara menurut Yuliani (2014), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori-teori dari literatur yang relevan dan dijadikan acuan belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian belum merupakan jawaban yang empirik.

Maka berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu maka dirumuskan tiga hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

H1: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X1) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

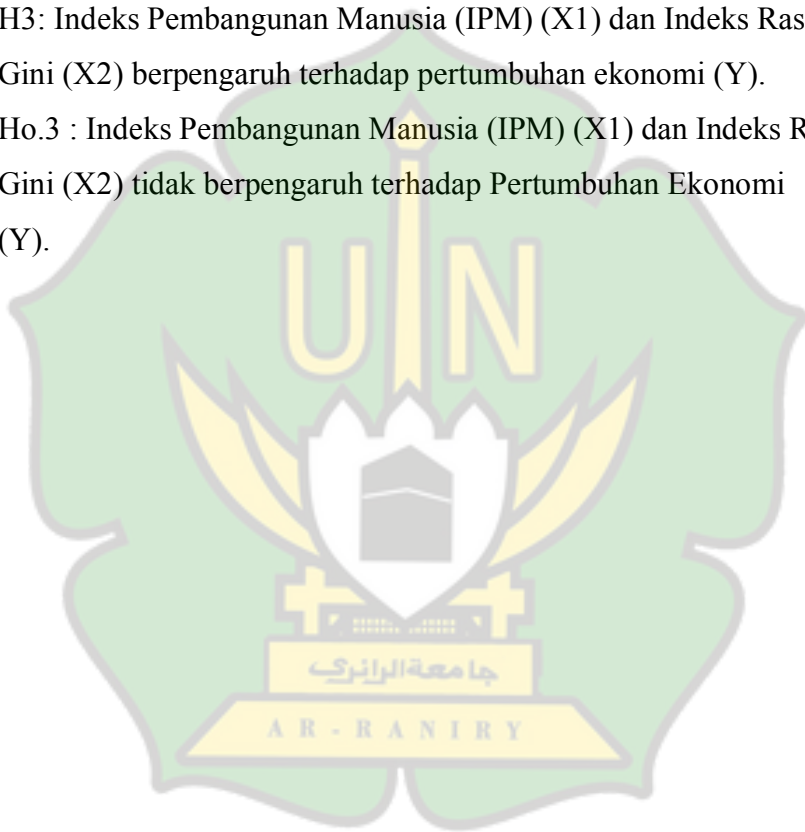
Ho.1 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X1) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

H2: Indeks Rasio Gini (X_2) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

Ho.2: Indeks Rasio Gini (X_2) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi (Y).

H3: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1) dan Indeks Rasio Gini (X_2) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

Ho.3 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1) dan Indeks Rasio Gini (X_2) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (*quantitative research*) yang bersifat untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan antara indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks rasio gini terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Sugiyono (2009), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini memiliki dua variabel penelitian, yaitu: (1) variabel independen, dan (2) variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen, sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen (Dewi & Budhi, 2018).

3.2 Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi dan ruang lingkup penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kabupaten/kota di provinsi Aceh. Data sekunder tentang indeks pembangunan manusia (IPM), indeks rasio gini, dan PDRB kabupaten/kota di provinsi Aceh diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh Periode tahun 2010-2017.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh sumber-sumber di luar organisasi, di antaranya publikasi pemerintah, buku dan majalah. Dalam hal ini data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappeda Provinsi Aceh. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi Aceh yang berdasarkan atas harga konstan 2010 pada tahun 2017 dalam satuan juta rupiah, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- b. Data Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh dari BPS Provinsi Aceh periode tahun 2010-2017.
- c. Data Indeks Rasio Gini Provinsi Aceh yang juga diperoleh melalui BPS Provinsi Aceh periode tahun 2010-2017.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan cara studi kepustakaan, mengunjungi tempat pusat kajian, pusat arsip seperti BPS dan melakukan observasi.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah provinsi Aceh, yaitu populasi dari indeks pembangunan manusia, indeks rasio gini dan

PDRB. Sampel dalam penelitian ini menggunakan data panel, yaitu dengan menggabungkan data *cross section* dan data *time series*, data *cross section* pada penelitian ini adalah 10 kabupaten/kota di provinsi aceh dan data *time series* pada penelitian ini adalah tahun 2010 s/d 2017 (delapan periode tahun terakhir).

3.5.1 Teknik Sampling

Sampling dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengumpulkan data yang sifatnya tidak menyeluruh yaitu mencakup seluruh objek penelitian (populasi) tetapi hanya sebagian dari populasi saja. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan yaitu dalam penelitian ini digunakan untuk penentuan sampel adalah teknik Non Probability sampling. Teknik Non Probability Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Umar, 2008).

Sementara teknik Non Probability Sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Purposive Sampling, dimana Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah

karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai. Dan berikut uraian mengapa pada penelitian ini menggunakan teknik sampling Non Probability Purposive Sampling:

- a. 10 Kabupaten/Kota yang dipilih dalam penelitian ini merupakan sebagian besar wilayah/daerah terpencil serta terkemuka di wilayah Provinsi Aceh.
- b.10 Kabupaten/Kota yang dipilih memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda mulai dari yang mengalami penurunan sampai mengalami kenaikan secara perlahan-lahan.
- c.10 Kabupaten/Kota memiliki latar belakang IPM yang berbeda-beda serta ketimpangan pendapatan yang beberapa di antaranya bertolak belakang, sehingga menjadi suatu daya tarik bagi peneliti untuk menjadikan 10 Kabupaten/Kota sebagai sampel penelitian.

3.6 Variabel Penelitian

3.6.1 Pengertian Variable Penelitian

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis variabel sendiri dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu:

1. Variabel dependen

Variabel terikat atau Variabel Y diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia dan indeks rasio gini.

2. Variabel Independen

Variabel bebas atau variabel X diartikan sebagai variabel yang akan mempengaruhi secara positif maupun negatif terhadap variabel terikat.

Di dalam pola hubungannya variabel bebas yang ditentukan dalam penelitian ini adalah pembangunan ekonomi dan kesenjangan ekonomi dimana uraiannya sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X1)
2. Indeks Rasio Gini (Ketimpangan Pendapatan) (X2)

3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana suatu variabel diukur. Definisi operasional variabel yang dijelaskan adalah operasionalisasi konsep agar diteliti atau diukur melalui gejala-gejala yang ada. Variabel penelitian harus dapat diukur menurut skala yang lazim digunakan. Gambaran lebih jelas mengenai variabel penelitian seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat Sukirno dalam (Pambudi, 2013)	Menurut Hasyim (2016): 1. Pendapatan nasional riil 2. Pendapatan riil per kapitaKesejahteraan penduduk 3. Tenaga kerja dan 4. pengangguran
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukurtigadimensipokokpembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (<i>basic capabilities</i>) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.	Menurut BPS 1. Umur panjang 2. Pengetahuan 3. Standar hidup layak
Indeks Rasio Gini (X2)	Gini Rasio merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat kepincangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah yang telah diakui secara luas. Indeks gini rasio dengan asumsi-asumsi tertentu dapat pula dipergunakan untuk bahan analisis perbandingan pembagian pendapatan relatif antar masyarakat dari beberapa negara atau wilayah tertentu (Syamsuddin, 2011)	Menurut (Siradjuddin, 2015) 1. axiomatic 2. stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu 1. the generalized entropy (GE) 2. ukuran atkinson 3. koefisien gini.

4.8. Metode Analisis Data

4.8.1 Analisis Regresi Data Panel

Data-data dalam penelitian ini diuji menggunakan metode regresi data panel yang menggabungkan data seksi silang (*cross section*) dan data rentan waktu (*time series*). Analisis regresi data panel dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen IPM (X_1), Indeks Rasio Gini (X_2), terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi (Y).serta untuk mengetahui seberapa besar dan arah hubungan digunakan analisis regresi data panel dengan metode *General Least Square* (GLS) dan pengolahanya menggunakan alat bantu aplikasi EViews 10, yang hubungan fungsinya dinyatakan dalam regresi data panel dengan menggunakan $\ln$ (logaritma natural) pada persamaan berikut :

$$\ln PDRB_{it} = \alpha + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 IRG_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (proksi pertumbuhan ekonomi)

$\ln$: logaritma natural

β : beta

α : konstanta

it : variabel individu ke i dan periode ke t

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

IRG : Indeks Rasio Gini

e_{it} = error term

4.8.2 Model Estimasi Regresi Data Panel

Dalam regresi data panel terdapat tiga teknik yang dapat digunakan dalam mengestimasi model regresi, yakni *Common Effect* (CEM), *Fixed Effect* (FEM), dan *Random Effect* (REM) (Hidayat dan Nalle, 2017).

1. *Common Effect Model* (CEM)

Model ini dikenal dengan *estimasi commont effect* yaitu teknik estimasi paling sederhana hanya mengkombinasikan antara data *time series* dan *cross section*. Didalam pendekatan ini, unit *time series* dan *cross section* diperlakukan lalu diregresikan menggunakan metode *Ordinay Least Square* (OLS) untuk mengestimasi data panel. Kelemahan asumsi ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tidak melihat tiap objek yang saling berbeda, bahkan satu objek pada satu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain.

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Pendekatan *fixed effect* di sini maksudnya adalah satu objek, memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*). Pada metode *fixed effect*, estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobotan (*no weight*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV) dan dengan pembobotan (*cross section weight*) atau *General Least Square*

(GLS). Penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasikan data.

3. *Random Effect Model* (REM)

Random Effect digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode efek random menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. Model ini akan mengestimasi data panel, variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing daerah. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

4.8.3 Uji *Goodness of Fit*

Menurut (Hidayat dan Nalle, 2017). Untuk menentukan model yang tepat dalam analisis regresi data panel, digunakan uji *Goodness of Fit* yaitu dengan melakukan *Chow test* dan *Hausman test* dengan kriteria sebagai berikut:

a. *Chow Test*

Uji ini digunakan menentukan pilihan antara metode CEM atau FEM, dengan menggunakan hipotesis: H_0 : Metode yang dipilih *Common Effect Model* (CEM) H_1 : Metode yang dipilih *Fixed Effect*

Model (FEM). Dalam melakukan pengujian ini yaitu dengan melihat p-value. Apabila p-value kurang dari 0.05 (5 persen) maka model yang digunakan dalam uji ini adalah fixed effect.

Namun apabila p-value lebih dari 0.05 maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah common effect. Untuk melakukan uji chow memerlukan bantuan aplikasi EViews 10.

b. *Hausman Test*

Uji ini digunakan menentukan pilihan antara metode REM atau FEM, dengan menggunakan hipotesis: H_0 : Metode yang dipilih *Random Effect Model* (REM) H_1 : Metode yang dipilih *Fixed Effect Model* (FEM). Dasar penolakan H_0 dengan menggunakan pertimbangan probabilitas dari *cross-section random*. Jika probabilitas dari *cross-section random* < 0.05 (5 persen) maka model yang digunakan adalah fixed effect. Namun apabila *cross-section random* > 0.05 maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect. Untuk melakukan uji hausman memerlukan bantuan aplikasi EViews 10.

c. *Uji Lagrange Multiplier*

Uji Lagrange Multiplier adalah digunakan untuk menentukan metode yang terbaik dalam regresi data panel, apakah akan menggunakan *common effect* atau *random effect*. Nilai angka yang dibawah yaitu sebesar (0.0000) dimana nilainya ($< 0,5$) sehingga *Lagrange Multiplier Test* ini menunjukkan bahwa menerima H_1 yang berarti metode estimasi terbaik adalah *random effect*. Apabila

nilai nya ($>0,5$) maka menerima H_0 yang berarti metode estimasi yang terbaik adalah *Common Effect*.

4.9 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah variable tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai probabilitas di setiap variabel lebih kecil dari konstanta (prob. < 0.05). Untuk menghitung nilai t hitung memerlukan bantuan aplikasi EViews 10. Untuk mengetahui hasil dari uji t, digunakan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Masing-masing variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_1 : Masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dasar pengambil keputusan :

1. Jika nilai probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika nilai probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

4.10 Uji signifikansi Simultan (Uji f)

Dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam penelitian secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, perlu dilakukan pengujian koefisien

regresi secara serentak. Pengujian menggunakan derajat signifikansi nilai F dengan menggunakan software Eviews 10. Untuk mengetahui hasil dari uji f , digunakan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_1 : Semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan :

1. Jika nilai probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika nilai probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

4.11 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Menurut Umar (2008) nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya. Pengujian koefisien determinasi R^2 menggunakan software Eviews.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Populasi Penelitian



Sumber Gambar: Dinas Kesehatan Aceh

Gambar 4.1
Peta Provinsi Aceh

Provinsi Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Provinsi Aceh memiliki luas wilayah darat 5.677,081 km², wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.478,80 km² dan garis pantai sepanjang 2.698,89 km atau 1.677,01 mil, Provinsi Aceh memiliki 23

kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 761 mukim dan 6.464 gampong/desa.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh (2018) jumlah penduduk di Provinsi Aceh adalah 5.495.798 jiwa (Bappeda Aceh, 2018). Maka dalam penelitian ini akan diteliti tentang bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Rasio Gini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh berdasarkan 10 Kabupaten/Kota yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut merupakan tabel kabupaten/kota yang menjadi sampel untuk penelitian dalam populasi wilayah Provinsi Aceh, yaitu:

Tabel 4.1
10 kabupaten/kota di Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kota Banda Aceh	238.814
2	Kota Sabang	40.040
3	Kota Langsa	182.424
4	Kota Lhoksmawe	190.624
5	Kota Subulussalam	81.187
6	Kabupaten Bener Meriah	154.509
7	Kabupaten Gayo Lues	95.370
8	Kabupaten Nagan Raya	167.672
9	Kabupaten Pidie Jaya	157.588
10	Kabupaten Aceh Jaya	86.058

Sumber: Badan Pusat Statisti Aceh (BPS) Aceh (2018)

Berdasarkan tabel diatas sebagai sampel dari penelitian ini maka akan di uraikan data-data penelitian yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh serta Bappeda Provinsi Aceh

untuk diteliti hasilnya apakah IPM serta Rasio Gini mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh, dan berikut uraian dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

4.1.1 Kota Banda Aceh

Kota Banda aceh merupakan Ibu Kota dari Provinsi, juga sebagai pusat pemerintahan, kegiatan politik serta ekonomi dan sosial budaya. Kota Banda Aceh memiliki jumlah penduduk sebanyak 238.814 jiwa. Dan berikut tabel data PDRB, Indeks Pembangunan Manusia serta Indeks Rasio Gini Kota Banda Aceh periode tahun 2010-2017 :

Tabel 4.2
PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Rasio
Gini Kota
Banda Aceh periode 2010-2017

No	Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	IPM (%)	Rasio Gini (%)
1	2010	10.062.081,40	80,36	0,30
2	2011	10.518.849,20	80,87	0,31
3	2012	11.079.680,20	81,3	0,33
4	2013	11.597.228,50	81,84	0,29
5	2014	12.119.047,30	82,22	0,29
6	2015	12.725.924,10	83,25	0,33
7	2016	13.529.409,90	83,73	0,31
8	2017	13.940.316,50	83,95	0,31

Sumber data: BPS Aceh

Dilihat pada tabel diatas untuk PDRB Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2010-2017, begitu pula halnya dengan IPM mengalami peningkatan dari 80,36% di tahun 2010 menjadi 83,95% di tahun 2017 dan untuk rasio gini (ketimpangan

pendapatan) mengalami naik-turun dan menjadi 0,31% ditahun 2017. Maka dari data diatas dapat dilihat bahwa PDRB Kota Banda Aceh mengalami kenaikan begitu juga dengan presentase IPM nya serta mengalami naik turunnya tingkat kesenjangan sehingga pada tahun 2017 tingkat ketimpangan Kota Banda Aceh tergolong sedang.

4.1.2 Kota Sabang

Kota sabang merupakan salah satu wilayah daerah yang berada di provinsi aceh, kota sabang merupakan kepulauan yang terletak di seberang utara pulau Sumatra dan pulau Weh. Parawisata Kota sabang juga sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat Kota sabang. Kota sabang memiliki 40.040 jiwa penduduk dan diperkirakan menjadi zona ekonomi bebas di Indonesia. Dan berikut data PDRB, IPM, dan Indeks Rasio Gini Kota Sabang periode tahun 2010-2017, yaitu:

Tabel 4.3
PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Rasio
Gini
Kota Sabang Periode 2010-2017

No	Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	IPM (%)	Rasio Gini (%)
1	2010	745.858,81	69,7	0,24
2	2011	774.469,42	70,15	0,24
3	2012	806.875,10	70,84	0,27
4	2013	841.805,66	71,07	0,31
5	2014	874.079,17	71,5	0,29
6	2015	908.358,57	72,51	0,27
7	2016	957.293,60	73,36	0,30

Tabel 4.3 (Lanjutan)

8	2017	1.015.425,21	74,1	0,25
---	------	--------------	------	------

Sumber data: BPS Aceh

Maka tabel diatas mengenai wilayah Kota Sabang menunjukkan PDRB Kota sabang terus menerus meningkat dalam kurun waktu 8 tahun dari tahun 2010-2018. Begitupula dengan indeks pembangunan manusia (IPM) nya sama seperti Kota Banda Aceh, Kota Sabang mengalami naik-turun di bagian Rasio Gini dan mencapai 0,25% di tahun 2017 sebelum sedikit tinggi di tahun 2013 yang mencapai 0,31%. Maka pada Kota Sabang dapat dilihat kenaikan PDRB yang terjadi di setiap tahunnya dan begitu pula untuk IPM nya dan presentase ketimpangan pada Kota Sabang mengalami naik turun dan pada tahun 2017 ketimpangan pada Kota Sabang tergolong rendah yaitu sebesar 0.25% yang berarti $< 0.3\%$.

4.1.3 Kota Langsa

Kota Langsa merupakan salah satu Kota diProvinsi Aceh yang luasnya mencapai 262,41 km serta memiliki jumlah penduduk yang mencapai 182.424 jiwa. Kota Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa pada tanggal 21 juni tahun 2001 berdasarkan undang-undang Nomor 3, Kota Langsa juga dikenal sebagai Kota pendidikan,perdagangan,wisata dan lainnya. Dan berikut data PDRB, IPM, dan Rasio Gini Kota Langsa perioede tahun 2010-2017, yaitu :

Tabel 4.4
PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Rasio
Gini
Kota Langsa Periode 2010-2017

NO	Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	IPM (%)	Rasio Gini (%)
1	2010	2.609.185,06	71,79	0,32
2	2011	2.722.522,92	72,15	0,37
3	2012	2.851.123,22	72,75	0,34
4	2013	2.981.532,24	73,4	0,34
5	2014	3.113.491,08	73,81	0,34
6	2015	3.255.001,92	74,74	0,36
7	2016	3.391.389,66	75,41	0,36
8	2017	3.542.885,01	75,89	0,34

Sumber data: BPS Aceh

Maka pada tabel diatas dapat dilihat terjadi peningkatan secara terus menerus pada PDRB Kota Langsa, dan peningkatan juga pada IPM Kota Langsa yang mencapai 75,89% di tahun 2017. Untuk rasio gini Kota Langsa mengalami peningkatan sebanyak 0,37% di tahun 2011 sebelum 0,32% di tahun 2010, berangsur turun ditahun 2011 mencapai 0,34% dan tetap pada angka tersebut hingga tahun 2014 dan kemudian naik menjadi 36,% selama dua tahun yaitu pada tahun 2015 dan 2016 dan kemudia kembali menjadi 0,34% pada tahun 2017. Maka pada Kota Langsa dapat dilihat bahwa pada wilayah nya mengalami kenaikan pada PDRB nya dan meningkat pula pada IPM nya, untuk presentase ketimpangan nya Kota Langsa mengalami naik turun dan pada tahun 2017 ketimpangan Kota Langsa tergolong sedang yaitu sebesar 0.34%.

4.1.4 Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kota Lhokseumawe adalah 181,06 km², jumlah penduduk pada kabupaten Kota Lhokseumawe sebanyak 190.624 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.502 jiwa/km² (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatra. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh. Dan berikut merupakan data PDRB, IPM dan Rasio Gini Kota Lhoksmawe periode tahun 2010-2017, yaitu :

Tabel 4.5
PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Rasio
Gini
Kota Lhokseumawe Periode 2010-2017

NO	Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	IPM (%)	Rasio Gini (%)
1	2010	9.091.248,66	71,55	0,28
2	2011	8.873.694,67	72,35	0,30
3	2012	8.980.377,13	73,55	0,45
4	2013	8.878.224,43	74,13	0,32
5	2014	8.347.714,38	74,44	0,33
6	2015	6.859.830,96	75,11	0,32
7	2016	6.460.408,23	75,78	0,29
8	2017	6.593.492,16	76,34	0,29

Sumber data: BPS Aceh

Pada tabel diatas Kota Lhoksmawe mengalami penurunan pada angka PDRB nya yang awalnya pada tahun 2010 mencapai

9.091.248,66 (Juta Rupiah) menurun drastis pada tahun 2017 yang menapai 6.953.000,00 (Juta Rupiah) sebelum turun sedikit demi sedikit di tahun 2011 hingga 2014 yang masih bertahan dengan angka 8. Untuk IPM pada Kota Lhoksmawe terjadi peningkatan secara terus menerus, dan untuk data rasio gini Kota Lhoksmawe mengalami naik turun dan yang paling tinggi terdapat pada tahun 2012 yang mencapai 0,45%. Maka pada Kota Lhokseumawe dapat dilihat terjadinya penurunan pada PDRB nya dan sedikit peningkatan pada IPM nya dan untuk presentase ketimpangan pendapatannya Kota Lhoksmawe tergolong rendah pada tingkat ketimpangan pendapatannya, yaitu 0.29%.

4.1.5 Kota Subulussalam

Kota Subulussalam adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kota Subulussalam adalah 1.391,00 km², jumlah penduduk pada kabupaten Kota Subulussalam sebanyak 81.187 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 58 jiwa/km². Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Dan berikut data PDRB, IPM, Rasio Gini Kota Subulussalam periode tahun 2010-2017, yaitu:

Tabel 4.6
PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Rasio Gini
Kota Subulussalam Periode 2010-2017

NO	Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	IPM	Rasio Gini
1	2010	901.649,31	58,97	0,31
2	2011	940.710,93	59,34	0,25
3	2012	984.713,31	59,76	0,28
4	2013	1.033.527,95	60,11	0,32
5	2014	1.087.849,55	60,39	0,30
6	2015	1.142.556,54	61,32	0,37
7	2016	1.191.823,71	62,18	0,33
8	2017	1.253.318,67	62,88	0,33

Sumber data: BPS Aceh

Pada tabel diatas, Kota Subulussalam mengalami peningkatan pada jumlah PDRB nya mulai dari tahun 2010 hingga 2017. Untuk IPM kota Subulussalam juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada data rasio gini Kota Subussalam mengalami penurunan pada tahun 2011 yang mencapai 0,25% dan sebelumnya pada tahun 2010 mencapao 0,31%, namun kembali naik secara perlahan pada tahun 2012 dan turun kembali di tahun 2014 dan kemudian naik sebanyak 0,37% ditahun 2015 dan kemudian turun pada tahun berikutnya dan menetap pada tahun 2017 sebesar 0,33% hal ini menyatakan bahwa tingkat ketimpangan pada wilayah ini tergolong sedang.

4.1.6 Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran

Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas tujuh kecamatan. Kabupaten Bener Meriah yang beribu kota di Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.454,09 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa, jumlah penduduk pada kabupaten Bener Meriah sebanyak 154.509 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 106 jiwa/km². Dan berikut data PDRB, IPM, dan Rasio Gini pada Kabupaten Bener Meriah periode tahun 2010-2017, yaitu:

Tabel 4.7
PDRB, Indeks Pembangunan Manusia Indeks Rasio Gini
Kabupaten Bener Meriah Periode 2010-2017

NO	Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	IPM (%)	Rasio Gini (%)
1	2010	2.420.611,87	67,29	0,20
2	2011	2.528.784,19	68,24	0,23
3	2012	2.661.123,94	69,14	0,23
4	2013	2.804.613,17	69,74	0,23
5	2014	2.933.323,50	70	0,24
6	2015	3.078.471,95	70,62	0,28
7	2016	3.207.521,50	71,42	0,28
8	2017	3.337.614,70	71,89	0,21

Sumber data: BPS Aceh

Pada tabel diatas yang berdasarkan data PDRB, IPM dan Rasio Gini Kabupaten Bener Meriah maka dapat dilihat bahwa jumlah PDRB Kabupaten Bener Meriah mengalami peningkatan sedikit demi sedikit, begitu pula untuk data IPM nya Kabupaten Bener Meriah mencapai angka 71,89% ditahun 2017. Untuk data rasio gini Kabupaten Bener Meriah sama halnya seperti daerah atau wilayah lainnya yang mengalami naik-turun untuk setiap tahunnya maka pada tahun 2017 Kabupaten Bener Meriah mendapatkan

presentase ketimpangan pendapatan sebesar 0.21% dan hal ini dapat berarti tingkat ketimpangan pada wilayah ini tergolong rendah.

4.1.7 Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dasar Hukum UU No.4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Luas wilayah kabupaten Gayo Lues adalah 5.719,58 km², jumlah penduduk pada kabupaten Gayo Lues sebanyak 95.370 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 17 jiwa/km². dan berikut PDRB, IPM, dan Indeks Rasio Gini Kabupaten Gayo Lues periode 2010-2017, yaitu :

Tabel 4.8
PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Rasio Gini
Kabupaten Gayo Lues Periode 2010-2017

No	Tahun	PDRB (juta Rupiah)	IPM (%)	Rasio Gini (%)
1	2010	1.389.536,60	60,93	0,24
2	2011	1.452.757,23	61,91	0,25
3	2012	1.531.658,23	62,85	0,25
4	2013	1.590.759,84	63,22	0,26
5	2014	1.654.168,85	63,34	0,28
6	2015	1.717.854,62	63,67	0,30
7	2016	1.786.368,56	64,26	0,31
8	2017	1.876.130,60	65,01	0,30

Sumber data: BPS Aceh

Pada tabel diatas menunjukan pada PDRB Kabupaten Gayo Lues mengalami peningkatan sedikit demi sedikit hingga mencapai

1.876.130.60 (Juta Rupiah) pada tahun 2017, untuk data IPM Gayo Lues juga mengalami peningkatan dari 60,93% pada tahun 2010 sehingga mencapai 65,01% di tahun 2017. Pada data rasio gini Kabupaten terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya dikisaran tahun 2010-2016, dan sedikit turun pada tahun 2017 yang mencapai 0,30% yang sebelumnya 0,31% pada tahun 2016, maka hal ini dapat diartikan bahwa tingkat ketimpangan pada Kabupaten Gayo Lues tergolong sedang dan sebelumnya pernah mengalami tingkat presentase ketimpangan yang rendah dan pada akhirnya terus menaik.

4.1.8 Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten Nagan Raya adalah 3.363,72 km², jumlah penduduk pada kabupaten Nagan Raya sebanyak 167.672 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 50 jiwa/km². Ibukotanya Suka Makmue, yang berjarak sekitar 287 km atau 6 jam perjalanan dari Banda Aceh. Dan berikut PDRB, IPM, dan Rasio Gini Kabupaten Nagan Raya periode 2010-2017, yaitu:

Tabel 4.9
PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Rasio Gini
Kabupaten Nagan Raya Periode 2010-2017

NO	Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	IPM (%)	Rasio Gini (%)
1	2010	4.573.878,13	63,57	0,24

Tabel 4.9 (Lanjutan)

2	2011	4.693.587,95	64,24	0,23
3	2012	4.867.307,17	64,91	0,22
4	2013	5.032.698,40	65,23	0,23
5	2014	5.181.129,58	65,58	0,28
6	2015	5.382.709,57	66,73	0,27
7	2016	5.641.779,01	67,32	0,28
8	2017	5.867.771,48	67,78	0,23

Sumber data: BPS Aceh

Pada tabel diatas menunjukkan Kabupaten Nagan Raya mengalami kenaikan jumlah PDRB setiap tahunnya pada 2010-2018. Begitu juga dengan angka kenaikan pada data IPM nya. Sama seperti wilayah kabupaten/kota lainnya Kabupaten Nagan Raya mengalami presentase yang naik-turun untuk rasio gini nya dan berakhir pada angka 0,23% pada tahun 2017 untuk Kabupaten Nagan Raya ini maka hal ini dapat diartikan tingkat ketimpangan pada wilayah ini tergolong rendah.

4.1.9 Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten Pidie Jaya adalah 1.073,60 km², jumlah penduduk pada kabupaten Pidie Jaya sebanyak 157.588 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 142 jiwa/km². Ibu kotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie.

Berikut PDRB, IPM, dan Indeks Rasio Gini Kabupaten Nagan Raya periode tahun 2010-2017, yaitu:

Tabel 4.10
PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Rasio Gini Kabupaten Pidie Jaya Periode 2010-2017

NO	Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	IPM (%)	Rasio Gini (%)
1	2010	1.765.903,55	68,38	0,22
2	2011	1.838.921,60	68,69	0,25
3	2012	1.918.490,82	68,69	0,22
4	2013	2.005.778,79	69,26	0,24
5	2014	2.077.390,74	69,89	0,23
6	2015	2.180.882,69	70,49	0,24
7	2016	2.259.852,90	71,13	0,25
8	2017	2.390.844,34	71,73	0,22

Sumber data : BPS Aceh

Pada tabel diatas yang menguraikan tentang data PDRB, IPM serta rasio gini Kabupaten Pidie Jaya, maka dapat dilihat kenaikan PDRB dan IPM pada Kabupaten ini, serta naik turunnya tingkat rasio gini yang pada akhir nya pada tahun 2017 mencapai 0,22% dan angka tersebut sama seperti tingkat presentase rasio gini pada tahun 2010 hal ini dapat diartikan bahwa tingkat presentase ketimpangan pendapatan pada wilayah Kabupaten Pidie jaya yaitu rendah.

4.1.10 Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten Aceh Jaya adalah 3.812,99 km², jumlah penduduk pada kabupaten Aceh Jaya

sebanyak 86.058 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 20 jiwa/km². Kabupaten Aceh Jaya dibentuk tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Dan berikut PDRB, IPM, dan Rasio Gini Kabupaten Aceh Jaya Periode 2010-2017, yaitu :

Tabel 4.11
PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Rasio Gini
Kabupaten Aceh Jaya Periode 2010-2017

NO	Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	IPM (%)	Rasio Gini (%)
1	2010	1.422.989,69	64,75	0,29
2	2011	1.482.238,10	65,17	0,28
3	2012	1.541.268,10	66,42	0,28
4	2013	1.590.573,31	66,92	0,27
5	2014	1.651.201,33	67,3	0,31
6	2015	1.718.899,90	67,53	0,34
7	2016	1.778.301,91	67,7	0,31
8	2017	1.854.246,47	68,07	0,29

Sumber data: BPS Aceh

Maka pada Kabupaten Aceh Jaya angka PDRB mengalami kenaikan meski dengan jumlah presentase yang kecil, dimana dapat dilihat pada tahun 2010 PDRB pada kabupaten ini sebesar 1.422.989,69 (Juta Rupiah) dan tetap mencapai angka yaitu 1.854.246,47 (Juta Rupiah) pada tahun 2017, meskipun begitu PDRB pada kabupaten ini mengalami peningkatan. Terkait presentase IPM, Kabupaten Aceh Jaya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun periode 2010-2017, dan masalah rasio gini kabupaten ini pun tetap sama halnya dengan kabupaten lainnya yang mengalami naik turu jumlah presentase angka indeks rasio gini, terakhir pada tahun 2017 tingkat presentase ketimpangan

pada Kabupaten Pidie Jaya sebesar 0.29% hal ini menyatakan tingkat ketimpangan pada wilayah ini tergolong rendah.

4.2 Estimasi Regresi Data Panel

Ada tiga macam pendekatan estimasi data panel yaitu, (a) pendekatan kuadrat terkecil *Common Effect model* (CEM); (b) pendekatan efek tetap *Fixed Effect Model* (FEM); (c) pendekatan efek acak *Random Effect Model* (REM). Dimana untuk memilih metode terbaik dalam data panel dilakukan *uji goodness of fit* yang berupa *Chow test*, *lagrange multiplier test* dan *Hausman Test*.

4.2.1 Hasil Chow Test

Pengujian ini untuk memilih apakah model yang digunakan *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*, maka digunakan uji F Restricted dengan membandingkan nilai cross-section F. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Pengujian dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika nilai probabilitas cross-section $F > \alpha$ (0,05) maka terima H_0 tolak H_1 .
- b) Jika nilai probabilitas cross-section $F < \alpha$ (0,05) maka terima H_1 tolak H_0 .

Hasil uji chow dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	596.895707	(9,68)	0.0000
Cross-section Chi-square	350.563033	9	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/01/19 Time: 17:36

Sample: 2010 2017

Periods included: 8

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.387288	0.831418	10.08793	0.0000
X1	0.090810	0.011880	7.643877	0.0000
X2	0.314531	1.581516	0.198879	0.8429

R-squared	0.453982	Mean dependent var	14.80963
Adjusted R-squared	0.439800	S.D. dependent var	0.823007
S.E. of regression	0.615992	Akaike info criterion	1.905614
Sum squared resid	29.21737	Schwarz criterion	1.994940
Log likelihood	-73.22455	Hannan-Quinn criter.	1.941427
F-statistic	32.01048	Durbin-Watson stat	0.006047
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari hasil *Chow test* pada pengolahan data panel diperoleh nilai probabilitas cross-section F sebesar 0,0000 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section $F < 0,05$ ($0,0000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa tolak H_0 terima H_1 . Sehingga model yang digunakan adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

4.2.2 Hasil *Hausman Test*

Hausman test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita dalam memilih apakah menggunakan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Maka digunakan uji dengan nilai cross-section random. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effects Model*

H_1 : *Fixed Effects Model*

Pengujian dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika nilai probabilitas cross-section random $> \alpha$ (0,05) maka terima H_0 tolak H_1 .
- b) Jika nilai probabilitas cross-section random $< \alpha$ (0,05) maka terima H_1 tolak H_0 .

Hasil uji hausman dapat dilihat di tabel berikut

Tabel 4.13
Hasil Hausmant Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.046148	2	0.5927

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.051946	0.053043	0.000001	0.3065
X2	0.793541	0.779448	0.000406	0.4842

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/01/19 Time: 17:41

Sample: 2010 2017

Periods included: 8

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.96105	0.435819	25.15043	0.0000
X1	0.051946	0.006549	7.931486	0.0000
X2	0.793541	0.319916	2.480466	0.0156
Effects Specification				

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.993175	Mean dependent var	14.80963
Adjusted R-squared	0.992071	S.D. dependent var	0.823007
S.E. of regression	0.073286	Akaike info criterion	-2.251424
Sum squared resid	0.365213	Schwarz criterion	-1.894120
Log likelihood	102.0570	Hannan-Quinn criter.	-2.108171
F-statistic	899.5592	Durbin-Watson stat	0.470519
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari hasil *Hausman test* pada pengolahan data panel diperoleh nilai probabilitas cross-section random sebesar 0,5927 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section $F > 0,05$ ($0,5927 > 0,05$) yang menunjukkan bahwa terima H_0 tolak H_1 . Sehingga model yang digunakan adalah model *Random Effect Model (REM)*.

4.2.3 Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

Dari hasil uji *Lagrange* pada estimasi regresi data panel, diperoleh model terbaik yaitu *Random Effect Model*. Hasil pengolahan data dengan menggunakan *Random Effect Model* pada penelitian ini terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data
Date: 10/01/19 Time: 18:10
Sample: 2010 2017
Total panel observations: 80
Probability in ()

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	267.9654 (0.0000)	3.979353 (0.0461)	271.9447 (0.0000)
Honda	16.36965 (0.0000)	-1.994832 (0.9770)	10.16453 (0.0000)
King-Wu	16.36965 (0.0000)	-1.994832 (0.9770)	9.331381 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	267.9654 (0.0000)

Nilai angka yang dibawah yaitu sebesar (0.0000) dimana nilainya ($<0,5$) sehingga *Lagrange Multiplier Test* ini menunjukkan bahwa menerima H_1 yang berarti metode estimasi terbaik adalah *random effect*. Apabila nilai nya ($>0,5$) maka menerima H_0 yang berarti metode estimasi yang terbaik adalah *Common Effect*.

4.3 Hasil Uji *Goodness of Fit*

Dari hasil uji *Goodness of Fit* pada estimasi regresi data panel, diperoleh model terbaik yaitu *Random Effect Model* Hasil pengolahan data dengan menggunakan *Random Effect Model* pada penelitian ini terdapat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.15
Random Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/01/19 Time: 17:34
Sample: 2010 2017

Periods included: 8

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 80

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.88857	0.485809	22.41327	0.0000
X1	0.053043	0.006461	8.209835	0.0000
X2	0.779448	0.319281	2.441259	0.0169
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.714834	0.9896
Idiosyncratic random			0.073286	0.0104
Weighted Statistics				
R-squared	0.558767	Mean dependent var		0.536448
Adjusted R-squared	0.547306	S.D. dependent var		0.108245
S.E. of regression	0.072830	Sum squared resid		0.408427
F-statistic	48.75543	Durbin-Watson stat		0.416456
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.379832	Mean dependent var		14.80963
Sum squared resid	33.18513	Durbin-Watson stat		0.005126

Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan *Random Effect Model* dapat dijelaskan melalui persamaan sebagai berikut :

$$PE = 10.88857 + 0.053043 (IPM) + 0.779448 (IRG) + e$$

Dimana:

PE :Pertumbuhan Ekonomi

IPM :Indeks Pembangunan Manusia

IRG :Indeks Rasio Gini

Dari hasil estimasi, nilai signifikansi statistik F sebesar $0.000000 < 0.05$, maka model yang dipakai eksis. Variabel indeks pembangunan manusia, dan indeks rasio gini yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai konstanta sebesar 10.88857 mengandung arti bahwa jika nilai jumlah indeks pembangunan manusia dan indeks rasio gini adalah sebesar 0, maka Pertumbuhan Ekonomi akan sebesar 10.88857.

Pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa variabel indeks pembangunan manusia (X_1) memiliki probabilitas sebesar 0,0000 (lebih kecil dari α 0,05) dan koefisien sebesar 0.053043. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi. Maka artinya, kenaikan satu persen indeks pembangunan manusia akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% sesuai dengan asumsi *Ceteris Paribus*.

Variabel indeks rasio gini (X_2) memiliki probabilitas sebesar 0.0169 (lebih kecil dari α 0,05) dan koefisien sebesar 0.779448 hal ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara variabel indeks rasio gini dengan pertumbuhan ekonomi. Maka artinya kenaikan satu persen indeks rasio gini akan menaikkan

pertumbuhan ekonomi sebesar 78% sesuai dengan asumsi *Ceteris Paribus*.

4.3.1 Hasil Uji Signifikasi Parameter Individu (Uji t)

Pada tabel 4.15 yang merupakan hasil REM (*Random Effect Model*) yang telah ditentukan *Uji Goodness Of Fit* terdapat hasil Uji t yang diketahui nilai T-statistiknya untuk pertumbuhan ekonomi (Y) yaitu sebesar 22.41327 dengan probabilitas 0.0000 yang berarti lebih kecil dari α 0,05 dan untuk variable Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X1) yaitu sebesar 8.209835 dengan probabilitas 0.0000 yang berarti lebih kecil dari α 0,05 sementara untuk variable Indeks Rasio Gini (X2) nilainya sebesar 2.441259 dengan probabilitas 0.0169 yang berarti lebih kecil dari α 0,05. Hal ini menunjukkan dalam penelitian ini bahwa variable X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variable Y dari hasil regresinya dibuktikan melalui hasil uji signifikasi parameter individu (Uji t).

4.3.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai F-statistik dalam model ini adalah sebesar 48.75543 dengan probabilitas sebesar 0.000000 (lebih kecil dari α 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen indeks pembangunan manusia, dan indeks rasio gini mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.

4.4 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi ini menunjukkan seberapa besar variabel independen dalam penelitian menjelaskan variabel terikatnya. Dalam penelitian ini variabel independen antara lain: indeks pembangunan manusia dan indeks rasio gini dan variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi.

Pada tabel 4.15 dapat diketahui R^2 dalam model ini adalah sebesar 0.558767 yang artinya sebesar 55.87% variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan model, sedangkan 44.13% sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uji signifikansi parameter individu (Uji T) terdapat hasil yang diketahui nilai T-statistiknya untuk variable Indeks Pembangunan Manusia (X_1) sebesar 8.209835 dengan probabilitas 0.0000 yang juga berarti lebih kecil dari 0.05 maka dalam penelitian ini diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variable Pertumbuhan Ekonomi (Y), hal ini dibuktikan melalui uji signifikansi parameter individu (Uji T).

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti (2017) yaitu dalam penelitiannya

menggunakan uji regresi linear berganda dan mengatakan bahwasannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sumatera Selatan, dengan taraf perhitungan probabilitas sebesar 0.0000 yang artinya lebih kecil daripada 0.05 sehingga terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana dalam penelitiannya terdapat tiga komponen indeks pembangunan manusia yaitu pendidikan, kesehatan serta daya beli.

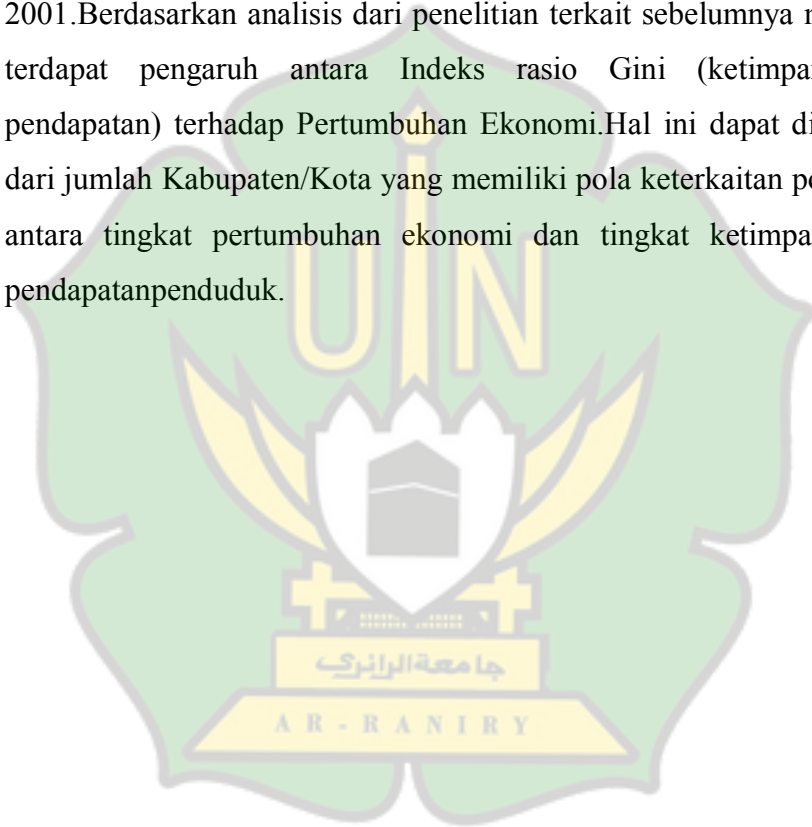
4.5.2 Pengaruh Indeks Rasio Gini terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada variable Indeks Rasio Gini (X_2) nilainya sebesar 2.441259 dengan probabilitas 0.0169 yang berarti lebih kecil dari α 0,05. Hal ini menunjukkan dalam penelitian ini bahwa Indeks Rasio Gini (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variable Pertumbuhan Ekonomi (Y) dari hasil regresinya dibuktikan melalui hasil uji signifikansi parameter individu (Uji T).

Maka hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Prapti (2006) yang mengatakan bahwasannya meskipun secara keseluruhan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah relative rendah namun terdapatnya fenomena adanya keterkaitan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan meningkatnya tingkat

kesenjangan/ketimpangan pendapatan penduduk, hal ini terjadi di sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pada penelitiannya Prapti (2006) mengatakan hal ini terjadi sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2001. Berdasarkan analisis dari penelitian terkait sebelumnya maka terdapat pengaruh antara Indeks rasio Gini (ketimpangan pendapatan) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki pola keterkaitan positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dan uji *Goodness of Fit* terpilih model yang terbaik yaitu *Random Effect Model*. Dari hasil uji signifikansi parameter individu (Uji t) menunjukkan bahwa secara parsial variable X1 (indeks pembangunan manusia) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Begitu juga dengan variable X2 (indeks rasio gini) mempunyai pengaruh yang signifikan pula terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Dari hasil uji signifikansi simultan (Uji f) pada menyatakan bahwa secara simultan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen yaitu indeks pembangunan manusia dan indeks rasio gini terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penulisan, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi Aceh agar lebih mengetahui lagi masalah-masalah yang mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi di daerahnya yang mana pemerintah Aceh bertanggung jawab akan daerah Aceh selaku sebagai pemimpin daerah Aceh.
2. Pemerintah provinsi Aceh harus lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Aceh.
3. Pemerintah provinsi Aceh juga harus meningkatkan tentang pembangunan manusia di daerah Aceh baik dari segi pendidikan, konsumsi, kesehatan serta faktor lainnya.
4. Bagi pemerintah provinsi Aceh harus lebih meningkatkan upaya penurunan ketimpangan yang terjadi di Aceh, sebagaimana ketimpangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah provinsi Aceh.
5. Bagi pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh harus meningkatkan sumber pendapatan di provinsi Aceh agar dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, S. (2015). Analisis Ketimpangan dalam Pembangunan Ekonomi antar Kecamatan di kabupaten Cilacap Tahun (2004-2013).
- Bantika. (2012). Faktor-Faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi utara.
- Bariyah, N. (2015). Analisis Indikator Fundamental Ekonomi Daerah Kalimantan Barat: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan HDI.
- Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di wilayah Sumatera.
- Bhakti, N. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia periode 2008-2012.
- Boedionoe. (2016). *Ekonomi Indonesia dalam Lintas sejarah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- BPS Aceh (2018). Aceh Dalam Angka 2018.
- BPS Aceh (2018). PDRB Aceh Tahun 2010-2017.
- Darmajati. (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa tengah.
- Dewi & Budhi. (2018). Analisis Pengaruh PAD Terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Fadliansyah. (2016). Analisis Kesenjangan Ekonomi di Kalimantan Selatan.
- Hartini, N. (2017). Pengaruh PDRB Per kapita, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2015.
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- Hidayat & Nalle (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap

- Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi*.
- Irmayanti. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar.
- Kairupan, P. (2013). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan Belanja Daerah pengaruhnya terhadap Kesempatan Kerja di Sulawesi Utara tahun 2000-2012.
- Maipita. (2014). *Mengukur kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Medan: UPP STIM YKPN.
- Manan, A. (2014). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- Maryaningsih, N. (2014). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
- Pambudi, W. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Jurnal Ekonomi*.
- Prapti, L. (2006). Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan (studi kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2000-2004).
- Pratowo, I. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- Rarung, P. (2016). Pengaruh PAD dan DAU terhadap PDRB di Kota Manado.
- Safitri, N. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan antar Wilayah Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
- Sasana. (2010). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan antar daerah dan Tenaga Kerja terserap terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Siradjuddin. (2015). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
- Soleh, C. (2014). *Dialektika Pembangunan dan Pemberdayaan*. Surabaya: FM Fokus Media.

- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif* . Bandung: ALFABETA.
- Suhartono. (2015). Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Pemekaran: Studi kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo.
- Sukirno, S. (2010). *Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumual. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan di Kota manado (tahun 2005-2014). *Jurnal Ekonomi*.
- Syamsuddin. (2011). Perhitungan Indeks Gini Ratio dan Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Jawa Barat tahun 2006-2010. *Jurnal Paradigma Ekonomika*.
- Todaro P. M. (2008). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Jilid I*. Jakarta. Erlangga.
- Umar, H. (2008). *Metodelogi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Wardana, S. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kesempatan Kerja di Bali.
- Widiyaningsih. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak.
- Yuliani, T. (2015). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten di Kalimantan Timur.

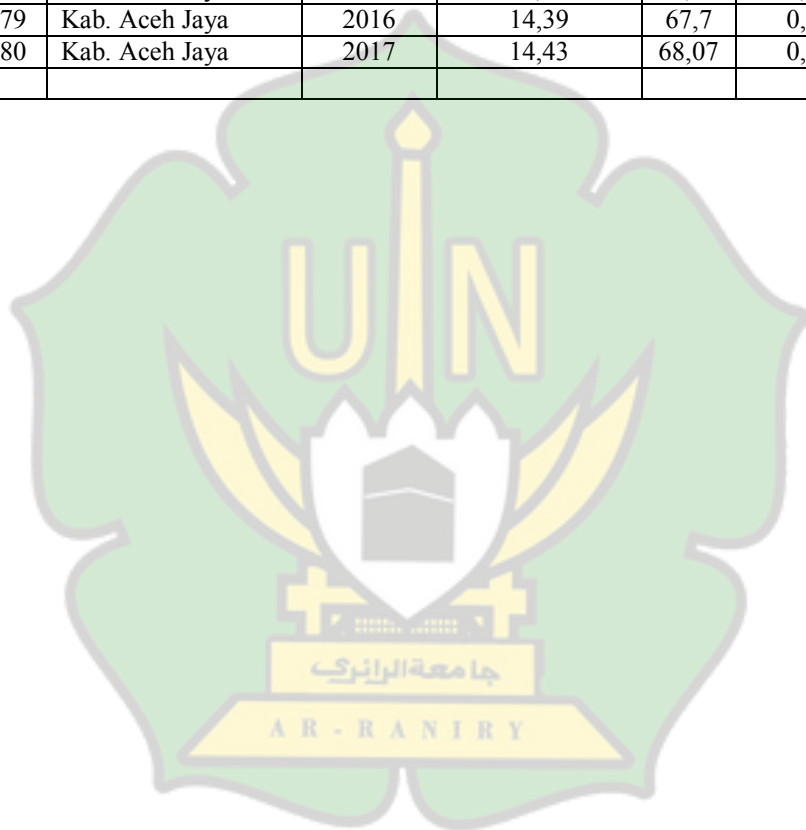
Lampiran 1

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Rasio Gini, dan PDRB Provisi Aceh untuk 10 Kabupaten dalam periode 8 tahun(2010-1017 dalam hitungan persen (%))

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (%)	IPM (%)	Indeks Rasio Gini (%)
1	Kota Banda Aceh	2010	16,12	80,36	0,30
2	Kota Banda Aceh	2011	16,17	80,87	0,31
3	Kota Banda Aceh	2012	16,22	81,3	0,33
4	Kota Banda Aceh	2013	16,27	81,84	0,29
5	Kota Banda Aceh	2014	16,31	82,22	0,29
6	Kota Banda Aceh	2015	16,36	83,25	0,33
7	Kota Banda Aceh	2016	16,42	83,73	0,31
8	Kota Banda Aceh	2017	16,45	83,95	0,31
9	Kota Sabang	2010	13,52	69,7	0,24
10	Kota sabang	2011	13,56	70,15	0,24
11	Kota Sabang	2012	13,60	70,84	0,27
12	Kota sabang	2013	13,64	71,07	0,31
13	Kota Sabang	2014	13,68	71,5	0,29
14	Kota Sabang	2015	13,72	72,51	0,27
15	Kota Sabang	2016	13,77	73,36	0,30
16	Kota Sabang	2017	13,83	74,1	0,25
17	Kota Langsa	2010	14,77	71,79	0,32
18	Kota Langsa	2011	14,82	72,15	0,37
19	Kota Langsa	2012	14,86	72,75	0,34
20	Kota Langsa	2013	14,91	73,4	0,34
21	Kota Langsa	2014	14,95	73,81	0,34
22	Kota Langsa	2015	15,00	74,74	0,36
23	Kota Langsa	2016	15,04	75,41	0,36
24	Kota Langsa	2017	15,08	75,89	0,34
25	Kota Lhoksmawe	2010	16,02	71,55	0,28
26	Kota Lhoksmawe	2011	16,00	72,35	0,30
27	Kota Lhoksmawe	2012	16,01	73,55	0,45
28	Kota Lhoksmawe	2013	16,00	74,13	0,32
29	Kota Lhoksmawe	2014	15,94	74,44	0,33
30	Kota Lhoksmawe	2015	15,74	75,11	0,32

31	Kota Lhoksmawe	2016	15,68	74,78	0,29
32	Kota Lhoksmawe	2017	15,75	76,34	0,29
33	Kota Subussalam	2010	13,71	58,97	0,31
34	Kota Subussalam	2011	13,75	59,34	0,25
35	Kota Subussalam	2012	13,80	59,76	0,28
36	Kota Subussalam	2013	13,85	60,11	0,32
37	Kota Subussalam	2014	13,90	60,39	0,30
38	Kota Subussalam	2015	13,95	61,32	0,37
39	Kota Subussalam	2016	13,99	62,18	0,33
40	Kota Subussalam	2017	14,04	62,88	0,33
41	Kab. Bener Meriah	2010	14,70	67,29	0,20
42	Kab. Bener Meriah	2011	14,74	68,24	0,23
43	Kab. Bener Meriah	2012	14,79	69,14	0,23
44	Kab. Bener Meriah	2013	14,85	69,74	0,23
45	Kab. Bener Meriah	2014	14,89	70	0,24
46	Kab. Bener Meriah	2015	14,94	70,62	0,28
47	Kab. Bener Meriah	2016	14,98	71,42	0,28
48	Kab. Bener Meriah	2017	15,02	71,89	0,21
49	Kab. Gayo Lues	2010	14,14	60,93	0,24
50	Kab. Gayo Lues	2011	14,19	61,91	0,25
51	Kab. Gayo Lues	2012	14,24	62,85	0,25
52	Kab. Gayo Lues	2013	14,28	63,22	0,26
53	Kab. Gayo Lues	2014	14,32	63,34	0,28
54	Kab. Gayo Lues	2015	14,36	63,67	0,30
55	Kab. Gayo Lues	2016	14,40	64,26	0,31
56	Kab. Gayo lues	2017	14,44	65,01	0,30
57	Kab. Nagan Raya	2010	15,34	63,57	0,24
58	Kab. Nagan Raya	2011	15,36	64,24	0,23
59	Kab. Nagan Raya	2012	15,40	64,91	0,22
60	Kab. Nagan Raya	2013	15,43	65,23	0,23
61	Kab. Nagan Raya	2014	15,46	65,58	0,28
62	Kab. Nagan raya	2015	15,50	66,73	0,27
63	Kab. Nagan raya	2016	15,55	67,32	0,28
64	Kab. Nagan raya	2017	15,59	67,78	0,23
65	Kab. Pidie Jaya	2010	14,38	68,38	0,22
66	Kab. Pidie Jaya	2011	14,42	68,69	0,25
67	Kab. Pidie Jaya	2012	14,47	68,69	0,22
68	Kab. Pidie Jaya	2013	14,51	69,26	0,24
69	Kab. Pidie Jaya	2014	14,55	69,89	0,23
70	Kab. Pidie Jaya	2015	14,60	70,49	0,24
71	Kab. Pidie Jaya	2016	14,63	71,13	0,25

72	Kab. Pidie Jaya	2017	14,69	71,73	0,22
73	Kab. Aceh Jaya	2010	14,17	64,75	0,29
74	Kab. Aceh Jaya	2011	14,21	65,17	0,28
75	Kab. Aceh jaya	2012	14,25	66,42	0,28
76	Kab. Aceh Jaya	2013	14,28	66,92	0,27
77	Kab. Aceh Jaya	2014	14,32	67,3	0,31
78	Kab. Aceh Jaya	2015	14,36	67,53	0,34
79	Kab. Aceh Jaya	2016	14,39	67,7	0,31
80	Kab. Aceh Jaya	2017	14,43	68,07	0,29



Lampiran 2

**Data PDRB 10 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh (dalam hitungan
Juta Rupiah) (periode 2010-2017)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB
1	Kota Banda Aceh	2010	10.062.081,42
2	Kota Banda Aceh	2011	10.518.849,16
3	Kota Banda Aceh	2012	11.079.680,15
4	Kota Banda Aceh	2013	11.597.228,47
5	Kota Banda Aceh	2014	12.119.047,34
6	Kota Banda Aceh	2015	12.725.924,07
7	Kota Banda Aceh	2016	13.529.409,89
8	Kota Banda Aceh	2017	13.940.316,46
9	Kota Sabang	2010	745.858,81
10	Kota Sabang	2011	747.469,42
11	Kota Sabang	2012	806.875,10
12	Kota Sabang	2013	841.805,66
13	Kota Sabang	2014	874.079,17
14	Kota Sabang	2015	908.358,57
15	Kota Sabang	2016	957.293,60
16	Kota Sabang	2017	1.015.425,21
17	Kota Langsa	2010	2.609.185,06
18	Kota Langsa	2011	2.722.522,92
19	Kota Langsa	2012	2.851.123,22
20	Kota Langsa	2013	2.981.532,24
21	Kota Langsa	2014	3.113.491,08
22	Kota Langsa	2015	3.255.001,92
23	Kota Langsa	2016	3.391.389,66
24	Kota Langsa	2017	3.542.885,01
25	Kota Lhoksmawe	2010	9.091.248,66
26	Kota Lhoksmawe	2011	8.873.694,67
27	Kota Lhoksmawe	2012	8.980.377,13
28	Kota Lhoksmawe	2013	8.878.224,43
29	Kota Lhoksmawe	2014	8.347.714,38
30	Kota Lhoksmawe	2015	6.859.830,96
31	Kota Lhoksmawe	2016	6.460.408,23
32	Kota Lhoksmawe	2017	6.593.492,16
33	Kota Subussalam	2010	901.694,31
34	Kota Subussalam	2011	940.710,93
35	Kota Subussalam	2012	984.713,31

36	Kota Subussalam	2013	1.033.527,95
37	Kota Subussalam	2014	1.087.849,55
38	Kota Subussalam	2015	1.142.556,54
39	Kota Subussalam	2016	1.191.823,71
40	Kota Subussalam	2017	1.253.318,67
41	Kab. Bener Meriah	2010	2.420.611,87
42	Kab. Bener Meriah	2011	2.528.784,19
43	Kab. Bener Meriah	2012	2.661.123,94
44	Kab. Bener Meriah	2013	2.804.613,17
45	Kab. Bener Meriah	2014	2.933.323,50
46	Kab. Bener Meriah	2015	3.078.471,95
47	Kab. Bener Meriah	2016	3.207.521,50
48	Kab. Bener Meriah	2017	3.337.614,70
49	Kab. Gayo Lues	2010	1.389.536,60
50	Kab. Gayo Lues	2011	1.452.757,23
51	Kab. Gayo Lues	2012	1.531.658,23
52	Kab. Gayo Lues	2013	1.590.759,84
53	Kab. Gayo Lues	2014	1.654.168,85
54	Kab. Gayo Lues	2015	1.717.854,62
55	Kab. Gayo Lues	2016	1.786.368,56
56	Kab. Gayo lues	2017	1.876.130,60
57	Kab. Nagan Raya	2010	4.573.878,13
58	Kab. Nagan Raya	2011	4.693.587,95
59	Kab. Nagan Raya	2012	4.867.307,17
60	Kab. Nagan Raya	2013	5.032.698,40
61	Kab. Nagan Raya	2014	5.181.129,58
62	Kab. Nagan raya	2015	5.382.709,57
63	Kab. Nagan raya	2016	5.641.779,01
64	Kab. Nagan raya	2017	5.867.771,48
65	Kab. Pidie Jaya	2010	1.765.903,55
66	Kab. Pidie Jaya	2011	1.838.921,60
67	Kab. Pidie Jaya	2012	1.918.490,82
68	Kab. Pidie Jaya	2013	2.005.778,79
69	Kab. Pidie Jaya	2014	2.077.390,74
70	Kab. Pidie Jaya	2015	2.180.882,69
71	Kab. Pidie Jaya	2016	2.259.852,90
72	Kab. Pidie Jaya	2017	2.390.844,34
73	Kab. Aceh Jaya	2010	1.422.989,69
74	Kab. Aceh Jaya	2011	1.482.238,10
75	Kab. Aceh jaya	2012	1.541.268,10
76	Kab. Aceh Jaya	2013	1.590.573,31

77	Kab. Aceh Jaya	2014	1.651.201,33
78	Kab. Aceh Jaya	2015	1.718.899,90
79	Kab. Aceh Jaya	2016	1.778.301,91
80	Kab. Aceh Jaya	2017	1.854.246,47



Lampiran 3

Hasil Uji *Chow Test*

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	596.895707	(9,68)	0.0000
Cross-section Chi-square	350.563033	9	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/01/19 Time: 17:36

Sample: 2010 2017

Periods included: 8

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.387288	0.831418	10.08793	0.0000
X1	0.090810	0.011880	7.643877	0.0000
X2	0.314531	1.581516	0.198879	0.8429
R-squared	0.453982	Mean dependent var		14.80963
Adjusted R-squared	0.439800	S.D. dependent var		0.823007
S.E. of regression	0.615992	Akaike info criterion		1.905614
Sum squared resid	29.21737	Schwarz criterion		1.994940
Log likelihood	-73.22455	Hannan-Quinn criter.		1.941427
F-statistic	32.01048	Durbin-Watson stat		0.006047
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 4

Hasil Uji *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.046148	2	0.5927

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.051946	0.053043	0.000001	0.3065
X2	0.793541	0.779448	0.000406	0.4842

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/01/19 Time: 17:41

Sample: 2010 2017

Periods included: 8

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.96105	0.435819	25.15043	0.0000
X1	0.051946	0.006549	7.931486	0.0000
X2	0.793541	0.319916	2.480466	0.0156

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.993175	Mean dependent var	14.80963
Adjusted R-squared	0.992071	S.D. dependent var	0.823007
S.E. of regression	0.073286	Akaike info criterion	-2.251424
Sum squared resid	0.365213	Schwarz criterion	-1.894120
Log likelihood	102.0570	Hannan-Quinn criter.	-2.108171
F-statistic	899.5592	Durbin-Watson stat	0.470519
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran 5

Hasil Uji Lagrange

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 10/01/19 Time: 18:10

Sample: 2010 2017

Total panel observations: 80

Probability in ()

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	267.9654 (0.0000)	3.979353 (0.0461)	271.9447 (0.0000)
Honda	16.36965 (0.0000)	-1.994832 (0.9770)	10.16453 (0.0000)
King-Wu	16.36965 (0.0000)	-1.994832 (0.9770)	9.331381 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	267.9654 (0.0000)

Lampiran 6

Model CEM (*Common Effect Model*)

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/01/19 Time: 17:31

Sample: 2010 2017

Periods included: 8

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.387288	0.831418	10.08793	0.0000
X1	0.090810	0.011880	7.643877	0.0000
X2	0.314531	1.581516	0.198879	0.8429
R-squared	0.453982	Mean dependent var		14.80963
Adjusted R-squared	0.439800	S.D. dependent var		0.823007
S.E. of regression	0.615992	Akaike info criterion		1.905614
Sum squared resid	29.21737	Schwarz criterion		1.994940
Log likelihood	-73.22455	Hannan-Quinn criter.		1.941427
F-statistic	32.01048	Durbin-Watson stat		0.006047
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 7

Model FEM (*Fixed Effect Model*)

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/01/19 Time: 17:32

Sample: 2010 2017

Periods included: 8

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.96105	0.435819	25.15043	0.0000
X1	0.051946	0.006549	7.931486	0.0000
X2	0.793541	0.319916	2.480466	0.0156

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.993175	Mean dependent var	14.80963
Adjusted R-squared	0.992071	S.D. dependent var	0.823007
S.E. of regression	0.073286	Akaike info criterion	-2.251424
Sum squared resid	0.365213	Schwarz criterion	-1.894120
Log likelihood	102.0570	Hannan-Quinn criter.	-2.108171
F-statistic	899.5592	Durbin-Watson stat	0.470519
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 8

Model REM (*Random Effect Model*)

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 10/01/19 Time: 17:34

Sample: 2010 2017

Periods included: 8

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 80

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.88857	0.485809	22.41327	0.0000
X1	0.053043	0.006461	8.209835	0.0000
X2	0.779448	0.319281	2.441259	0.0169
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.714834	0.9896
Idiosyncratic random			0.073286	0.0104
Weighted Statistics				
R-squared	0.558767	Mean dependent var		0.536448
Adjusted R-squared	0.547306	S.D. dependent var		0.108245
S.E. of regression	0.072830	Sum squared resid		0.408427
F-statistic	48.75543	Durbin-Watson stat		0.416456
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.379832	Mean dependent var		14.80963
Sum squared resid	33.18513	Durbin-Watson stat		0.005126